

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan Kompas.com



Gambar 4.1 Logo Kompas.com

Sumber: Kompas.com, 2022

Kompas.com sebagai portal berita di Indonesia yang hadir pertama kali di internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas *Online*. Kompas.com merupakan sebuah portal berita *online* yang bertujuan untuk memberikan sebuah layanan kepada para pembaca dari harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan yang distribusikan oleh Kompas. Dengan hadirnya Kompas *Online* tersebut, para pembaca dari harian Kompas terutama di Indonesia bagian Timur dan di luar negeri dapat menikmati informasi hangat dari berita harian Kompas (Kompas.com, 2022).

Pada 29 Mei 2008, Kompas.com me-*rebranding* dirinya yang merujuk pada *brand* Kompas yang dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberikan suatu makna. Kanal-kanal pemberitaan ditambah sebagai sumber informasi yang lengkap serta produktivitas sajian pada berita ditingkatkan untuk memberikan sajian informasi yang terupdate dan aktual kepada para pembaca. Kanal pemberitaan pada Kompas.com yaitu News, Tren, Health, Food, Edukasi, Lifestyle, Bola, Travel, Otomotif, dan lain-lainnya.

Kompas.com merupakan sebuah portal berita *online* yang menyajikan berita terkini secara lengkap, akurat dan terpercaya. Dengan tagline “Jernih Melihat Dunia” Kompas.com ingin mengajak para pembaca melalui karya-karya jurnalistiknya untuk dapat melihat sebuah harapan, menghargai sebuah perbedaan dan menjernihkan pandangan (Nugroho W. , 2019).

4.1.2 Profil Perusahaan Tempo.co



Gambar 4.2 Logo Tempo.co

Sumber: Tempo.co, 2022

Tempo.co sebagai portal berita sejak tahun 1995 yang hadir menjadi sebuah portal berita yang dapat dipercaya masyarakat. Sejak Tahun 2008, Tempo.co telah lahir kembali dengan wajah baru dengan sajian berita yang lebih berkualitas. Tempo.co berupaya dengan menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam peliputan peristiwa serta menuliskan pemberitaan tersebut secara cerdas, tajam, dan berimbang. Hal tersebut untuk menghadirkan sebuah pemberitaan dan informasi yang dapat menarik, dapat diandalkan, bersifat independen, dan enak dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tempo.co yang hadir sebagai *platform* penyedia berita digital dalam bentuk *web-based* dan aplikasi *mobile* dengan upaya untuk membuat Indonesia lebih baik. Dengan tagline “Tempo, Untuk Publik, Untuk Republik”. Tempo.co juga memiliki berbagai kanal seperti Nasional, Bisnis, Dunia, Merto, Bola, Tekno, Cantik, Otomotif, Foto, Video, Seleb, Nusantara, Indeks, Travel, dan lain-lainnya (Tempo.co, 2022).

Tempo.co memiliki Visi sebagai “acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan” dan Misi “Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda” (Tempo.id, 2022).

4.2 Hasil dan Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis *Framing* Berita Kompas.com Sebelum Pandemi Covid-19

A. Analisis Artikel Berita 1 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: Per Februari 2019, Baru 40 dari 524 Anggota DPR yang Laporkan LHKPN.

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 25 Februari 2019

Ringkasan: Dari total 524 anggota DPR RI yang wajib melaporkan LHKPN, hanya 40 orang yang sudah menyerahkan. DPR menjadi lembaga negara dengan tingkat kepatuhan terendah dari 7 bidang pemerintahan yang dicatat oleh KPK. Keenam bidang pemerintahan lainnya terdiri dari eksekutif, yudikatif, MPR, DPD, DPRD, dan BUMN/BUMD.

Tabel 4.1 Analisis Artikel Berita 1 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | Per Februari 2019, Baru 40 dari 524 Anggota DPR yang Laporkan LHKPN |
| | Lead | Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPR hanya sebesar 7,63 persen. |
| | Latar Informasi | Dari total 524 anggota DPR RI yang wajib untuk melaporkan LHKPN hanya 40 orang yang sudah melaporkan LHKPN dan 484 lainnya belum melaporkan LHKPN. |
| | Kutipan Sumber | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): 1. “Masih lebih 400-an ya saya kira anggota DPR yang belum melaporkan karena baru 40 yang sudah melapor sampai dengan saat ini”. 2. “Tadi dari koordinasi yang dilakukan, jika memang anggota DPR membutuhkan kami bisa datang. Jadi, nanti KPK bisa menugaskan tim khusus ke DPR untuk membantu proses pengisian tersebut”. |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan rincian tingkat kepatuhan dari 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK. |

| | | |
|----------------|--|---|
| Skrip | What Where When Who Why How | Tingkat kepatuhan melapor LHKPN DPR RI terendah dari 7 bidang pemeritahan. Gedung Merah Putih KPK 25 Februari 2019 Febri Diansyah DPR menjadi lembaga negara dengan tingkat kepatuhan terendah dari 7 bidang pemerintahan. KPK siap untuk membantu DPR untuk meningkatkan presentase pelaporan LHKPN. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu tingkat kepatuhan DPR RI menjadi yang terendah dari 7 bidang pemerintahan yang dicatat oleh KPK dan KPK siap untuk membantu DPR demi meningkatkan presentase pelaporan LHKPN tersebut. Unsur koherensi yaitu terdapat kata hubung yang digunakan Kompas.com dengan menggunakan koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “dengan”, “hingga”, “pada”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Pada struktur retoris ini tidak memunculkan elemen leksikon. Pada elemen grafis, Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menampilkan foto Gedung DPR. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari stuktur sintaksis pemberitaan ini, penulis menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPR hanya sebesar 7,63 persen dari catatan KPK per 25 Februari 2019. Hal tersebut didukung dengan penekanan pada judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Baru 40 dari 524 Anggota DPR yang Laporkan LHKPN”. Pada *lead* mengenai tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR hanya sebesar 7,63 persen. Kemudian, pada latar informasi menjelaskan dari total 524 anggota DPR RI yang wajib untuk melaporkan LHKPN hanya 40 orang yang sudah melaporkan harta kekayaannya tersebut dan 484 lainnya belum melaporkan. Dalam kutipan sumber yang digunakan oleh penulis yaitu kutipan dari Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK mengenai sekitar 400 orang anggota DPR yang belum melaporkan dan baru 40 orang yang sudah melaporkan harta kekayaannya sampai saat ini. Dalam penutup artikel ini menjelaskan rincian tingkat kepatuhan dari 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan unsur 5W+1H. Pada unsur *what* yaitu tingkat kepatuhan melapor LHKPN DPR RI merupakan lembaga terendah dari 7 bidang pemerintahan. Unsur *where* berada di Gedung Merah Putih KPK dan unsur *when* terjadi pada 25 Februari 2019. Kemudian, pada unsur *why* menjelaskan DPR menjadi lembaga negara dengan tingkat kepatuhan terendah dari 7 bidang pemerintahan. Lalu, unsur *how* mengenai KPK siap untuk membantu DPR dalam meningkatkan presentase pelaporan LHKPN.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik dalam pemberitaan ini, terdapat unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu mengenai tingkat kepatuhan DPR RI menjadi lembaga terendah dari 7 bidang pemerintahan yang dicatat oleh KPK dan KPK siap untuk membantu DPR dalam meningkatkan presentase pelaporan LHKPN tersebut. pada unsur koherensi yaitu terdapat kata hubung yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan koherensi penjelas “dengan”, “hingga”, “pada”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris dalam pemberitaan ini memunculkan tidak memunculkan elemen leksikon. Pada elemen grafis penulis menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto Gedung DPR.

B. Analisis Artikel Berita 2 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: Sehari Jelang Penutupan, Penyerahan LHKPN Anggota DPR Belum Sampai 50 Persen

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 30 Maret 2019

Ringkasan: Sehari menjelang penutupan waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tingkat kepatuhan anggota DPR belum sampai 50 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kepatuhan anggota DPRD. Menurut data KPK, Sabtu, hingga pukul 14.00, tingkat kepatuhan anggota DPR baru 44,88 persen. Baru 250 yang sudah melapor, sedangkan 307 lainnya belum menyerahkan LHKPN.

Tabel 4.2 Analisis Artikel Berita 2 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | Sehari Jelang Penutupan, Penyerahan LHKPN Anggota DPR Belum Sampai 50 Persen |
| | Lead | Menjelang penutupan penyerahan LHKPN, tingkat kepatuhan DPR RI belum mencapai 50 persen. |
| | Latar Informasi | Menurut data dari KPK, sehari sebelum penutupan LHKPN tingkat kepatuhan DPR baru 44,88 persen. |
| | Kutipan Sumber | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): 1. “KPK berharap penyelenggara negara yang wajib lapor memiliki kesadaran untuk menyampaikan LHKPN. Karena ini adalah kewajiban bersama untuk memberantas korupsi”. 2. “Mengisi dan memperbarui LHKPN sekarang jauh lebih mudah, tinggal membuka elhkpn.kpk.go.id dan masuk menggunakan akun yang sudah ada. Jika belum ada akun, dapat menghubungi bagian LHKPN atau administrasi LHKPN di instansi masing-masing”. |
| | Pernyataan Opini | - |

| | | |
|----------------|---|--|
| | Penutup | Penutup dalam artikel ini merupakan kutipan sumber dari Febri Diansyah mengenai pengisian LHKPN yang sekarang ini lebih mudah dengan membuka elhkpn.kpk.go.id |
| Skrip | <p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p> | <p>Sehari menjelang penutupan LHKPN, tingkat kepatuhan pelaporan DPR belum sampai 50 persen.</p> <p>Jakarta</p> <p>30 Maret 2019</p> <p>Febri Diansyah</p> <p>KPK berharap kepada penyelenggara negara yang wajib lapor untuk memiliki kesadaran dalam menyampaikan LHKPN.</p> <p>KPK menugaskan 38 orang di bagian pendaftaran LHKPN dan unit terkait untuk berkerja pada hari Sabtu dan Minggu.</p> |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | <p>Unsur detail yaitu KPK menyebutkan bahwa sehari menjelang penutupan LHKPN, pelaporan anggota DPR baru 250 yang sudah melapor dan 307 lainnya belum menyerahkan LHKPN. Serta sebagai bagian dan upaya memaksimalkan pencegahan korupsi, KPK menugaskan 38 orang di bagian pendaftaran LHKPN pada hari Sabtu dan Minggu. Unsur koherensi dengan menggunakan koherensi penjelas yaitu “hingga”, “pada”, “sedangkan”, “terdapat”.</p> |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik dalam pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu dengan penggunaan kata “menjelang” pada <i>headline</i> artikel yang berarti mengunjungi. Elemen grafis yang digunakan yaitu penebalan dan huruf |

besar pada judul artikel serta menampilkan foto Febri Diansyah yang sedang diwawancarai wartawan.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini penulis memberikan judul “Sehari Jelang Penutupan, Penyerahan LHKPN Anggota DPR Belum Sampai 50 Persen” dengan menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN DPR baru 44,88 persen pada 30 Maret 2019. Hal tersebut didukung dengan *lead* yang ditonjolkan oleh penulis mengenai menjelang penutupan penyerahan LHKPN, tingkat kepatuhan DPR RI belum mencapai 50 persen. Dalam latar informasi menjelaskan menurut data dari KPK, sehari sebelum penutupan LHKPN tingkat kepatuhan DPR baru 44,88 persen. Dalam kutipan sumber yang digunakan penulis yaitu kutipan dari Febri Diansyah dengan berharap bahwa penyelenggara negara yang wajib lapor memiliki kesadaran untuk mengisi LHKPN, karena mengisi dan memperbarui LHKPN jauh lebih mudah. Pada penutup dalam artikel ini merupakan kutipan sumber dari Febri Diansyah mengenai pengisian LHKPN yang sekarang lebih mudah dengan membuka elhkpn.kpk.go.id

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* yaitu sehari menjelang penutupan LHKPN, tingkat kepatuhan pelaporan DPR belum sampai 50 persen. Unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 30 Maret 2019. Pada unsur *who* yaitu Febri Diansyah. Kemudian, pada unsur *why* mengenai KPK berharap kepada penyelenggara negara yang wajib lapor untuk memiliki kesadaran dalam menyampaikan LHKPN. Pada unsur *how* mengenai KPK menugaskan 38 orang di bagian pendaftaran LHKPN dan unit terkait untuk berkerja pada hari Sabtu dan Minggu.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini, terdapat unsur detail yaitu KPK menyebutkan bahwa sehari menjelang penutupan LHKPN pelaporan anggota DPR baru 250 orang yang sudah melapor dan 307 lainnya belum menyerahkan LHKPN. Serta sebagai bagian dan upaya memaksimalkan pencegahan korupsi, KPK

menugaskan 38 orang di bagian pendaftaran LHKPN pada hari Sabtu dan Minggu. Unsur koherensi dengan menggunakan koherensi penjelas yaitu “hingga”, “pada”, “sedangkan”, dan “terdapat”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu dengan penggunaan kata “menjelang” pada *headline* pemberitaan yang berarti mengunjungi. Elemen grafis yang digunakan penulis yaitu penebalan dan huruf besar pada judul artikel serta menampilkan foto Febri Diansyah yang sedang diwawancarai wartawan.

C. Analisis Artikel Berita 3 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Lapo LHKPN Sebesar 74,39 Persen

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 02 April 2019

Ringkasan: KPK sudah menutup batas akhir pelaporan LHKPN pada data terakhir per 31 Maret 2019. Menurut Febri, sekitar 250.000 lebih wajib lapor telah mengurus LHKPN dan yang belum sekitar 87.000. Secara umum tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN sebesar 74,39 persen. Febri berharap instansi-instansi terkait bisa memberi sanksi kepada Wajib Lapor yang tidak patuh mengurus LHKPN.

Tabel 4.3 Analisis Artikel Berita 3 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Lapo LHKPN Sebesar 74,39 Persen |
| | <i>Lead</i> | Data terakhir yang dicatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2019 mencatat bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN sebesar 74,39 persen. |
| | Latar Informasi | KPK mengungkap sekitar 250.000 lebih wajib lapor telah mengurus LHKPN, sementara penyelenggara negara yang belum melaporkan sekitar 87.000. |
| | Kutipan Sumber | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): |

1. “Kami menghargai dan menyampaikan terima kasih pada sekitar 74,39 persen ya dari seluruh penyelenggara negara yang Wajib Laport itu sudah menyampaikan laporan kekayaannya pada KPK”.
2. “Nanti daftar yang patuh melapor tepat waktu ini akan kami sampaikan pada instansi masing-masing”.
3. “Kami harapkan instansi masing-masing bisa menegakkan aturan internalnya untuk menjatuhkan teguran atau sanksi administratif sesuai yang berlaku di instansi masing-masing tersebut”.
4. “Karena di instansi yang eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan ada aturan masing-masing yang bisa jadi berbeda. Ada derajat aturan atau pelanggaran-pelanggaran disiplinnya di sana”.
5. “Yang DPR (persentase tingkat kepatuhan) 56,32 persen. Kami juga apresiasi ya ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi seperti ini”.
6. “Yang laport setelah 31 Maret 2019 akan tercatat pelaporan yang terlambat ya. Jadi tidak tepat waktu meskipun nanti pelaporan itu tetap akan masuk ke dalam sistem. Ketika disampaikan ke instansi masing-masing kami akan buat catatan mana penyelenggara negara yang melaporkan tepat waktu dan mana penyelenggara negara yang terlambat”

Pernyataan Opini

Penutup

-
Artikel ini ditutup dengan kutipan sumber dari Febri Diansyah yang

| | | |
|----------------|---|---|
| | | melapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat terlambat. |
| Skrip | What | Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN sebesar 74,39 persen |
| | Where | Jakarta |
| | When | 02 April 2019 |
| | Who | Febri Diansyah |
| | Why | Terdapat instansi yang wajib lapor sudah 100 persen dan cenderung rendah pelaporan. |
| | How | KPK mencatat sekitar 250.000 lebih wajib lapor telah mengurus LHKPN dan 87.000 yang belum melaporkan. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail, ungkapan KPK mengenai data kepatuhan wajib lapor penyelenggara negara sebesar 74,39 persen. Kata ganti yang digunakan Kompas.com adalah “Yang DPR yang berarti mengenai (persentase tingkat kepatuhan)” |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Pada struktur retoris ini elemen grafis, Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul artikel serta menampilkan foto Juru Bicara KPK Febri Diansyah. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang menunjukkan pada gambaran berita ini adalah judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Kompas.com memberikan judul “KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Sebesar 74,39 Persen”. Pada *lead* Kompas.com ingin memberikan penekanan bahwa tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai 74.39 persen dari data terakhir yang dicatat oleh KPK pada 31 Maret 2019. Dalam latar informasi yang tergambar menunjukkan KPK menungkap sekitar dari 250.000 lebih pejabat negara wajib lapor telah mengurus LHKPN dan yang belum melaporkan sekitar 87.000. Terkait

dengan kutipan sumber, Kompas.com mengambil kutipan dari Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Kemudian pada penutup dari artikel ini ditutup dengan kutipan sumber dari Febri Diansyah bahwa pejabat negara yang melapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat terlambat.

2. Struktur Skrip

Pada keseluruhan artikel pada Kompas.com memuat struktur skrip *what* yaitu terdapat tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 74,39 persen. Unsur *where* berada di Jakarta. *When* pada 02 April 2019. Pada unsur *who* yaitu Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK. *Why* yaitu terdapat instansi yang wajib lapor LHKPN sudah mencapai 100 persen dan terdapat pejabat negara yang rendah dalam pelaporan.

3. Struktur Tematik

Pada Kompas.com juga menampilkan struktur tematik. Unsur detail yaitu ungkapan KPK mengenai data kepatuhan wajib lapor penyelenggara negara sebesar 74,39 persen. Kemudian, terdapat unsur kata ganti yang digunakan Kompas.com adalah “Yang DPR yang berarti mengenai (persentase tingkat kepatuhan)”.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris, elemen grafis yang digunakan dalam berita Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul artikel serta menampilkan foto Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang sesuai dengan isi artikel.

D. Analisis Artikel Berita 4 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: KPK: Per 8 April, Tingkat Kepatuhan LHKPN di DPR Sebesar 63,82 Persen

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 08 April 2019

Ringkasan: Terdapat perbaikan pelaporan di sektor legislatif sebanyak 351 dari 550 anggota DPR sudah mengurus laporan harta kekayaannya ke KPK, dengan tingkat kepatuhan LHKPN di DPR sebesar 63,82 persen. Dengan instrumen LHKPN, lembaga legislatif setidaknya bisa diisi dengan lebih banyak orang-orang yang jujur dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Tabel 4.4 Analisis Artikel Berita 4 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | KPK: Per 8 April, Tingkat Kepatuhan LHKPN di DPR Sebesar 63,82 Persen |
| | Lead | Tingkat kepatuhan LHKPN DPR sebesar 56,32 persen pada 31 Maret 2019 |
| | Latar Informasi | Terdapat perbaikan di sektor legislatif sebesar 63,82 persen dalam mengurus laporan harta kekayaan ke KPK. Data tersebut merupakan data KPK pada 08 April 2019 |
| | Kutipan Sumber | <p>Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Ada perbaikan sebenarnya di sektor legislatif, jadi terima kasih dalam beberapa waktu belakangan sangat gencar kita minta gitu. Sekali lagi ini bukan masalah lapor melapor tapi masalah bukti komitmen dari legislatif”. 2. “Kita dengan KPU sepakat bahwa elektronik LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah caleg ini jujur atau tidak”. 3. “Jadi masyarakat kita harapkan untuk berkunjung ke website, gitu, kalau lihat nama ini orang bener apa enggak sih janjinya gitu, lihat yang pertama saja gitu apakah dia menyampaikan laporan harta kekayaannya atau ndak”. |
| | Pernyataan Opini | Kepatuhan dari anggota legislatif menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan masyarakat pada pemilu 2019. KPK dan KPU sepakat bahwa eLHKPN merupakan instrument yang bisa menguji caleg jujur atau tidak. |

| | | |
|----------------|---|--|
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan mengenai masyarakat dapat melihat pelaporan harta penyelenggara negara di website pantau LHKPN. |
| Skrip | What | DPR sudah mengurus laporan harta kekayaannya ke KPK |
| | Where | Gedung Merah Putih KPK, Jakarta |
| | When | 08 April 2019 |
| | Who | Pahala Nainggolan |
| | Why | Adanya perbaikan pada sektor legislatif dalam mengurus laporan harta kekayaan. |
| | How | KPK gencar meminta pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dari lembaga legislatif. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu data pelaporan harta kekayaan DPR terdapat perbaikan dari pada data sebelumnya. Unsur koherensi dalam pemberitaan kepatuhan DPR yang dilakukan menggunakan koherensi penjas dengan menggunakan kata hubung “dengan”, “sementara”, “sebanyak”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik dalam pemberitaan ini terdapat elemen leksikon yaitu “petahana” yang berarti sedang memegang jabatan. Elemen grafis yaitu penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relatif besar pada judul pemberitaan serta menampilkan foto KPK dan KPU dalam konferensi pers pengumuman LHKPN. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis ingin menjelaskan terkait tingkat kepatuhan LHKPN 351 dari 550 wajib lapor anggota DPR sudah mengurus laporan

harta kekayaannya ke KPK. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan penulis “KPK: Per 8 April, Tingkat Kepatuhan LHKPN di DPR Sebesar 63,82 Persen”. Pada *lead* mengenai tingkat kepatuhan LHKPN DPR sebesar 56,32 persen pada 31 Maret 2019 dan latar informasi menjelaskan terdapat perbaikan di sektor legislatif sebesar 63,82 persen dalam mengurus laporan harta kekayaan ke KPK. Data tersebut merupakan data dari KPK pada 08 April 2019. Hal tersebut juga ditambahkan oleh penulis dengan memasukan kutipan dari Pahala Nainggolan mengenai adanya perbaikan dari sektor legislatif dalam mengurus LHKPN ke KPK. Pernyataan opini yaitu mengenai kepatuhan dari anggota legislatif mejadi salah satu instrumen yang dapat digunakan masyarakat pada pemilu 2019. Pada penutup artikel ini ditutup dengan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan mengenai masyarakat dapat melihat pelaporan harta penyelenggara negara di website pantau LHKPN.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan unsur 5W+1H. pada unsur *what* yaitu DPR sudah mengurus laporan harta kekayaannya ke KPK. Pada unsur *where* berada di Gedung Merah Putih KPK dan unsur *when* terjadi pada 08 April 2019. Kemudian, unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan dan unsur *why* mengenai adanya perbaikan pada sektor legislatif dalam mengurus laporan harta kekayaannya. Lalu, pada unsur *how* mengenai KPK yang gencar dalam meminta laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari lembaga legislatif.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik dalam pemberitaan ini, unsur detail yang ditonjolkan penulis yaitu terdapat perbaikan dari pelaporan harta kekayaan DPR dari pada data sebelumnya. Unsur koherensi dalam pemberitaan kepatuhan DPR dengan menggunakan koherensi penjelas yaitu menggunakan kata hubung “dengan”, “sementara”, dan “sebanyak”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu penggunaan kata “petahana” yang berarti sedang memegang jabatan. Kemudian, pada elemen grafis penulis menggunakan penebalan dan ukuran huruf yang relatif

besar pada judul pemberitaan serta menampilkan foto KPK dan KPU dalam konferensi pers pengumuman LHKPN.

E. Analisis Artikel Berita 5 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: KPK Sebut Caleg yang Laporkan Harta Kekayaan Baru 66 Persen

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 12 April 2019

Ringkasan: Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut calon legislatif yang menyerahkan LHKPN baru 66 persen. Jumlah ini tidak menunjukkan angka yang baik, mengingat caleg punya kewajiban untuk menyerahkan LHKPN mereka sebagai syarat pelantikan. LHKPN juga penting sebagai instrumen untuk memonitor harta kekayaan calon anggota legislatif yang kelak terpilih.

Tabel 4.5 Analisis Artikel Berita 5 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | KPK Sebut Caleg yang Laporkan Harta Kekayaan Baru 66 Persen |
| | Lead | Agus Rahardjo menyebut bahwa calon legislatif baru 66 persen dalam menyerahkan LHKPN. |
| | Latar Informasi | Tingkat kepatuhan calon legislatif yang baru 66 persen disebut tidak menunjukkan angka yang baik karena kewajiban menyerahkan LHKPN merupakan syarat pelantikan calon legislatif. |
| | Kutipan Sumber | Agus Rahardjo (Ketua KPK): 1. "Saya berpesan supaya teman-teman di legislatif, karena monitoring sampai tadi jam 04.00 pagi belum menunjukkan kenaikan (laporan LHKPN) yang cukup baik. Legislatif tadi baru 66 persen (yang melapor)". 2. "Jadi kita tahu perkembangan dari harta mereka. Jadi kita nanti bisa memonitor, apakah mengumpulkan |

hartanya nanti ke depan wajar atau tidak”.

3. “Saya berharap ini akan menjadi contoh untuk calon pejabat publik yang lain baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif”.

Pramono Ubaid Tanthowi (Komisioner KPU):

1. “Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, jika tak menyerahkan maka ditunda pelantikannya”.

Agus meminta para calon legislatif untuk mencontoh pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019 dalam melaporkan harta kekayaannya.

Artikel ini ditutup dengan aturan penyerahan LHKPN untuk calon legislatif dalam pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

KPK sebut pelaporan harta kekayaan calon legislatif masih tidak menunjukkan angka yang baik.

Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat
12 April 2019

Agus Rahardjo dan Pramono Ubaid Tanthowi

Calon legislatif tidak menunjukkan angka yang baik dalam menyerahkan kewajiban LHKPN.

KPK melakukan monitoring sampai jam 4 pagi belum menunjukkan kenaikan laporan LHKPN yang cukup baik.

Pernyataan Opini

Penutup

What

Where

When

Who

Why

How

Skrip

| | | |
|----------------|---|--|
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu tingkat kepatuhan calon legislatif dalam menyerahkan LHKPN baru 66 persen tidak menunjukkan angka yang baik mengingat menyerahkan LHKPN merupakan syarat pelantikan serta penyerahan LHKPN dilakukan paling lambat 7 hari setelah penetapan hasil pemilu dan LHKPN sebagai instrumen penting untuk memonitor harta kekayaan calon anggota legislatif yang kelak terpilih. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik dalam artikel ini tidak memunculkan elemen leksikon dan pada elemen grafis Kompas.com menampilkan penggunaan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto Ketua KPK Agus Rahardjo. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis menonjolkan informasi mengenai jumlah angka pelaporan harta kekayaan yang tidak baik dari calon legislatif dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang baru 66 persen. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan penulis “KPK Sebut Caleg yang Laporkan Harta Kekayaan Baru 66 Persen”. Pada *lead* mengenai Agus Rahardjo selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa calon legislatif baru 66 persen dalam menyerahkan LHKPN ke KPK. Pada latar informasi menjelaskan tingkat kepatuhan dari calon legislatif disebut tidak menunjukkan angka yang baik karena kewajiban menyerahkan LHKPN merupakan syarat dari pelantikan calon legislatif. Penulis juga memasukan kutipan sumber dari Agus Rahardjo mengenai KPK yang menunggu pelaporan dari calon legislatif sampai jam 4 pagi belum menunjukkan kenaikan pelaporan LHKPN yang cukup baik dan kutipan dari Pramono Ubaid selaku Komisioner KPU yang

menyebutkan batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Pada pernyataan opini Agus meminta para calon legislatif untuk mencontoh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaporkan harta kekayaannya. Kemudian, penutup dalam artikel ini ditutup dengan aturan penyerahan LHKPN untuk calon legislatif dalam pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* yaitu KPK sebut pelaporan harta kekayaan calon legislatif masih tidak menunjukkan angka yang baik. Pada unsur *where* berada di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat dan unsur *when* terjadi pada 12 April 2019. Kemudian, pada unsur *why* mengenai calon legislatif tidak menunjukkan angka yang baik dalam menyerahkan kewajiban LHKPN. Selanjutnya unsur *how* mengenai KPK melakukan monitoring sampai jam 4 pagi belum menunjukkan kenaikan laporan LHKPN dari calon legislatif.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik terdapat unsur detail yaitu tingkat kepatuhan calon legislatif dalam menyerahkan LHKPN baru 66 persen, hal tersebut tidak menunjukkan angka yang baik mengingat menyerahkan LHKPN merupakan syarat pelantikan calon legislatif serta penyerahan LHKPN dilakukan paling lambat 7 hari setelah penetapan hasil pemilu dan LHKPN merupakan instrumen penting untuk memonitor calon anggota legislatif yang kelak terpilih.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik pemberitaan ini tidak memunculkan elemen leksikon dan pada elemen grafis penulis menampilkan penggunaan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

4.2.2 Analisis Framing Berita Tempo.co Sebelum Pandemi Covid-19

A. Analisis Artikel Berita 1 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: KPK Ingatkan Pelaporan LHKPN Pejabat Masih Rendah

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 25 Februari 2019

Ringkasan: Jumlah pejabat yang telah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periode 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi masih rendah. Menurut data KPK per 25 Februari 2019, pejabat yang wajib melaporkan LHKPN berjumlah 329.124 orang. Namun, yang sudah melaporkan hanya 58.598 orang, sementara 270.544 orang belum melapor.

Tabel 4.6 Analisis Artikel Berita 1 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | KPK Ingatkan Pelaporan LHKPN Pejabat Masih Rendah |
| | Lead | Kepatuhan penyelenggara negara yang telah membuat LHKPN periode 2019 ke KPK masih rendah. |
| | Latar Informasi | KPK menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan secara nasional penyelenggara negara yang melapor LHKPN baru berkisar 17,8 persen. |
| | Kutipan Sumber | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): 1. "Tingkat kepatuhan secara nasional baru berkisar 17,8 persen". 2. "membantu mereka jika ada kesulitan". 3. "Kemungkinan akan kami datangi agar bisa membantu penyelenggara di sana untuk lebih mudah melaporkan LHKPN". |
| | Pernyataan Opini | Kemungkinan KPK akan mendatangi penyelenggara untuk membantu dalam melaporkan LHKPN. |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Febri Diansyah mengenai KPK akan kembali mendatangi sejumlah lembaga negara untuk membantu proses pelaporan LHKPN. |
| Skrip | What | Pelaporan LHKPN pejabat negara masih rendah |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Where | Jakarta |
| | When | 25 Februari 2019 |
| | Who | Febri Diansyah |
| | Why | Rendahnya pelaporan LHKPN periode 2019 penyelenggara negara. |
| | How | Lembaga dengan tingkat kepatuhan paling rendah adalah DPR yaitu presentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen. Diikuti lembaga kedua yang paling malas melaporkan kekayaannya yaitu DPRD dengan presentase 10,21 persen. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu dengan menungkap tingkat kepatuhan dari lembaga yang malas melaporkan LHKPN ke KPK. Kata ganti “mereka” yang dimaksud dengan 75 Instansi |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Elemen retorik dalam pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon dengan penggunaan kata "paling malas" melaporkan kekayaannya masih di lembaga legislatif. Elemen grafis yaitu penebalan judul dan huruf besar pada <i>headline</i> pemberitaan serta penggunaan foto grafik jumlah anggota dewan yang menyerahkan LHKPN. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis menonjolkan informasi mengenai pejabat negara yang membuat LHKPN periode 2019 ke KPK masih terbilang rendah. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan penulis yaitu “KPK Ingatkan Pelaporan LHKPN Pejabat Masih Rendah”. Pada *lead* mengenai kepatuhan dari penyelenggara negara yang telah membuat LHKPN periode 2019 ke KPK masih rendah. Kemudian, latar informasi menjelaskan KPK menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan secara nasional penyelenggara negara yang melapor LHKPN baru berkisar 17,8 persen. Kutipan sumber yang dimasukan oleh penulis

yaitu dari Febri Diansyah yang menjelaskan tingkat kepatuhan secara nasional baru 17,8 persen dari pejabat negara yang wajib lapor LHKPN berjumlah 329.124 orang yang sudah melapor hanya 58.598 orang. Pada pernyataan opini yaitu kemungkinan KPK akan mendatangi penyelenggara untuk membantu dalam melaporkan LHKPN. Lalu, pada penutup artikel ini mengenai pernyataan dari Febri Diansyah tentang KPK akan kembali mendatangi sejumlah lembaga negara dalam membantu proses pelaporan LHKPN.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* yaitu pelaporan LHKPN pejabat negara masih terbilang rendah. Pada unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 25 Februari 2019. Unsur *who* yaitu Febri Diansyah. Kemudian, unsur *why* mengenai rendahnya pelaporan LHKPN pejabat negara pada periode 2019. Unsur *how* mengenai lembaga dengan tingkat kepatuhan paling rendah adalah DPR yaitu dengan presentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen. Hal tersebut diikuti dengan lembaga kedua yang paling malas melaporkan harta kekayaannya yaitu DPRD dengan presentase 10,21 persen.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini terdapat unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis mengenai tingkat kepatuhan yang diungkap oleh KPK dari lembaga yang malas melaporkan LHKPN ke KPK. Unsur kata ganti yaitu “mereka” yang dimaksud dengan 75 instansi.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon dengan penggunaan kata “paling malas” melaporkan harta kekayaannya masih di lembaga legislatif. Kemudian, pada elemen grafis penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada *headline* pemberitaan serta menggunakan foto grafik jumlah anggota dewan yang menyerahkan LHKPN.

B. Analisis Artikel Berita 2 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 31 Maret 2019

Ringkasan: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan baru 49,1 persen anggota DPR yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Padahal batas pelaporan LHKPN akan berakhir pada hari ini, 31 Maret 2019. Menurut data KPK jumlah anggota DPR yang menjadi wajib lapor LHKPN sebanyak 556 orang. Namun, hingga pukul 11.00 baru 273 orang yang melapor.

Tabel 4.7 Analisis Artikel Berita 2 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|---|---|
| Sintaksis | <p>Judul</p> <p><i>Lead</i></p> <p>Latar Informasi</p> | <p>Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum Lapor LHKPN</p> <p>Di hari terakhir batas pelaporan LHKPN, KPK menyatakan baru 49,1 persen anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya.</p> <p>Menurut data dari KPK jumlah anggota DPR yang wajib lapor LHKPN sebanyak 556 orang. Namun, baru 273 orang yang melaporkan harta kekayaannya.</p> |
| | <p>Kutipan Sumber</p> <p>Pernyataan Opini</p> <p>Penutup</p> | <p>Isnaini (Direktur LHKPN KPK):</p> <p>1. “Kalau yang masih rendah, menurut data kami DPR. DPR pusat ini masih 49,1 persen”.</p> <p>-</p> <p>Penutup dalam artikel ini merupakan pernyataan dari Isnaini mengenai himbauan kepada para pimpinan instansi untuk memerintahkan jajarannya untuk membuat segera LHKPN dan memberikan sanksi kepada bawahannya yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK.</p> |
| Skrip | <p><i>What</i></p> <p><i>Where</i></p> <p><i>When</i></p> | <p>Setengah anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya diakhir batas pelaporan LHKPN.</p> <p>Gedung KPK</p> <p>31 Maret 2019</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Who | Isnaini |
| | Why | Setengah anggota DPR belum melaporkan LHKPN ke KPK di hari terakhir pelaporan. |
| | How | KPK meminta pimpinan instansi agar para jajarannya untuk segera membuat LHKPN dan memberikan sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu KPK menyebutkan tingkat kepatuhan LHKPN DPR menjadi lembaga peringkat pertama dalam menyetorkan harta kekayaannya dengan presentase 49,1 persen yang baru melaporkan harta kekayaannya, dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sudah mencapai 60 persen dalam melaporkan LHKPN. Unsur koherensi terdapat beberapa kata hubung dengan menggunakan koherensi penjelas yaitu “dengan”, “sementara”, “hingga”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Pada struktur retoris dalam artikel ini tidak memunculkan elemen leksikon. Pada elemen grafis Tempo.co menggunakan penebalan dan huruf besar pada judul pemberitaan serta menggunakan foto Lima pejabat internal KPK yang baru mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini, judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Hari Terakhir, Setengah Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN” dengan menjelaskan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) anggota DPR baru 49,1 persen dalam melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pada *lead* mengenai di hari terakhir batas pelaporan, KPK menyatakan baru 49,1 persen

anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya. Latar informasi menjelaskan data dari KPK yaitu jumlah anggota DPR yang wajib lapor LHKPN sebanyak 556 orang. Namun, baru 273 orang yang melaporkan harta kekayaannya. Penulis memasukan kutipan sumber dari Isnaini selaku Direktur LHKPN KPK dengan menjelaskan DPR masih menjadi instansi yang rendah dalam melaporkan LHKPN ke KPK. Penutup dalam artikel ini merupakan pernyataan dari Isnaini mengenai himbauan kepada para pimpinan instansi untuk memerintahkan jajarannya dalam membuat segera LHKPN dan memberikan sanksi bagi bawahannya yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan unsur 5W+1H. pada unsur *what* mengenai setengah dari anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya di akhir batas pelaporan LHKPN. Unsur *where* berada di Gedung KPK dan unsur *when* terjadi pada 31 Maret 2019. Selanjutnya, pada unsur *why* mengenai setengah dari anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Unsur *how* mengenai KPK yang meminta para pimpinan instansi agar para jajarannya untuk segera membuat LHKPN dan memberikan sebuah sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini terdapat unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu KPK menyebutkan tingkat kepatuhan dari LHKPN anggota DPR menjadi lembaga di peringkat pertama dalam menyetorkan harta kekayaannya dengan presentase 49,1 persen yang baru melaporkan harta kekayaannya, dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sudah mencapai 60 persen dalam melaporkan LHKPN. Kemudian, unsur koherensi yang digunakan penulis yaitu terdapat kata hubung dengan menggunakan koherensi penjelas yaitu “dengan”, “sementara”, “hingga”.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam pemberitaan ini tidak memunculkan elemen leksikon. Pada elemen grafis penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada judul pemberitaan serta menggunakan foto Lima pejabat internal KPK yang baru mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan.

C. Analisis Artikel Berita 3 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Lapor Kekayaan

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 01 April 2019

Ringkasan: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya. Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, tingkat kepatuhan pelaporan yang paling rendah ada di lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Salah satu indikator politik berintegritas, kata Febri, adalah keterbukaan dan pelaporan secara benar kekayaan penyelenggara negara. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.8 Analisis Artikel Berita 3 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Lapor Kekayaan |
| | Lead | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya |
| | Latar Informasi | KPK mengungkap tingkat kepatuhan paling rendah ada di lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD |
| | Kutipan Sumber | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): 1. “Kami juga apresiasi ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi yang seperti ini”. 2. “Ini adalah bagian dari upaya KPK mewujudkan politik berintegritas yang pertama”. 3. “Orang-orang yang benar-benar nanti bisa berkontribusi positif untuk kemaslahatan publik dan juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi”. |

| | | |
|----------------|---|--|
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Febri Diansyah mengenai orang-orang yang berkontribusi positif dalam kemaslahatan publik dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. |
| Skrip | What | KPK menyebutkan baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya. |
| | Where | Jakarta |
| | When | 01 April 2019 |
| | Who | Febri Diansyah |
| | Why | Baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya. |
| | How | Tingkat kepatuhan pelaporan paling rendah ada di lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail, KPK menyebut baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya dan akan memaparkan nama-nama anggota yang sudah melaporkan kekayaannya agar publik memiliki informasi sebagai dasar untuk memilih calon anggota legislatif yang tepat pada pemilu 2019. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Elemen leksikon pada Tempo menggunakan kata “Kemaslahatan” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Pada elemen grafis, Tempo menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menampilkan foto Febri Diansyah yang sedang diwawancarai. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis yang diamati adalah *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Tempo.co memberikan judul “KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Lapori Kekayaan”. Dengan menggunakan kata yang singkat pada *headline* pemberitaan. Pada *lead* dan latar informasi Tempo.co ingin memberikan penekanan bahwa KPK mencatat baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya ditingkat kepatuhan paling rendah. Pada kutipan sumber, penulis ingin menyampaikan bahwa dalam melaporkan harta kekayaan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk berkontribusi positif dan mewujudkan politik yang berintegritas. Dalam penutup artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK mengenai orang-orang yang berkontribusi positif dalam kemaslahatan publik dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam pemberitaan ini mencakup 5W+1H. unsur *what* yaitu KPK menyebutkan baru 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya. *Where* berada di Jakarta. Unsur *when* terjadi pada 01 April 2019. Kemudian dalam unsur *who* dalam pemberitaan ini yaitu Febri Diansyah. Pada unsur *why* yaitu baru dari 56,32 persen anggota DPR RI yang melapor harta kekayaan dan pada unsur *how* yaitu terdapat tingkat kepatuhan pelaporan yang paling rendah berada di lembaga legislatif yaitu DPR.

3. Struktur Tematik

Pada pemberitaan Tempo.co ini menampilkan struktur tematik. Pada unsur detail yaitu KPK menyebutkan baru dari 56,32 persen anggota DPR RI yang melaporkan harta kekayaannya dan KPK akan memaparkan nama-nama anggota yang telah melaporkan harta kekayaannya agar publik dapat memiliki informasi dasar untuk memilih calon anggota legislatif yang tepat pada pemilu 2019.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris berita ini memunculkan elemen leksikon dengan menggunakan kata “Kemaslahatan” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian pada elemen grafis, Tempo menggunakan huruf besar dan

penebalan pada judul serta menampilkan foto Febri Diansyah yang sedang diwawancarai.

D. Analisis Artikel Berita 4 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: Disindir Politikus Demokrat, Sudahkah Sri Mulyani Serahkan LHKPN?

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 16 April 2019

Ringkasan: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipastikan telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan Nufansa menanggapi celetukan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean yang mempertanyakan kepatuhan menteri-menteri Kabinet Indonesia Kerja Jokowi dalam melaporkan hartanya.

Tabel 4.9 Analisis Artikel Berita 4 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | Disindir Politikus Demokrat, Sudahkah Sri Mulyani Serahkan LHKPN? |
| | Lead | Politikus Demokrat Ferdinand menyindir Menteri era Presiden Jokowi tidak patuh melaporkan LHKPN ke KPK |
| | Latar Informasi | Nufansa Wira Sakti memastikan bahwa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah menyerahkan LHKPN 2018 kepada KPK. |
| | Kutipan Sumber | Nufansa Wira Sakti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan): 1. "Menteri Keuangan RI sudah melaporkan LHKPN secara resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku". Ferdinand Hutahaean (Politikus Demokrat): |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 1. “Ehhh, katanya bersih!! Ternyata seperti ini? Tak pernah lapor harta kekayaan?”. |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan Sri Mulyani yang menaikkan gaji PNS sekitar 5 persen pada 2019. |
| Skrip | What | Menteri era Presiden Jokowi disindir Politikus karena tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. |
| | Where | Jakarta |
| | When | 16 April 2019 |
| | Who | Nufransa Wira Sakti & Ferdinand Hutahaean |
| | Why | Sindiran politikus terhadap tingkat kepatuhan Menteri Jokowi dalam melapor LHKPN |
| | How | Dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat kepatuhan LHKPN Menteri Jokowi berkisar 60 persen. Sedangkan pada tahun ini 70 persen. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu tanggapan dari Nufransa terhadap celetukan dari politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean terhadap Menteri era Presiden Jokowi belum ada satu pun menyerahkan LHKPN ke KPK. Berdasarkan Data dari KPK, Sri Mulyani termasuk Menteri yang patuh melaporkan LHKPN. Unsur koherensi yaitu koherensi penjelas dengan penggunaan kata “sementara”, “berdasarkan”, “dikutip”, “meski”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Elemen leksikon yang muncul dalam pemberitaan ini yaitu penggunaan kata “dinukil” yang dimaksud mengutip. Lembaga “antirasuah” yang berarti KPK. “ditilik” yang berarti dilihat. |

Pada elemen grafis Tempo.co menggunakan penebalan dan huruf besar pada *headline* pemberitaan serta penggunaan foto Menteri Keuangan Sri Mulyani

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis menjelaskan terkait Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyindir Menteri Kabinet Indonesia Kerja Jokowi dalam melaporkan harta kekayaannya, hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Disindir Politikus Demokrat, Sudahkah Sri Mulyani Serahkan LHKPN?”. Pada *lead* mengenai Politikus Demokrat Ferdinand yang menyindir Menteri era Presiden Jokowi yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN ke KPK. Latar informasi menjelaskan tanggapan dari Nurfansa Wira Sakti mengenai pertanyaan dari Ferdinand terkait Menteri yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan dengan memastikan bahwa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani telah menyerahkan LHKPN 2018 pada KPK. Penulis memasukan dua kutipan sumber yang pertama dari Nufansa Wira Sakti terkait Menteri Keuangan sudah melaporkan LHKPN yang secara resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, kedua dari Ferdinand Hutahaean mengenai tanggapannya tentang Menteri yang tak pernah lapor harta kekayaan. Penutup dalam artikel ini ditutup dengan Sri Mulyani yang menaikkan gaji PNS sekitar 5 persen pada tahun 2019.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi unsur 5W+1H. pada unsur *what* mengenai Menteri era Presiden Jokowi yang disindir Politikus karena tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 16 April 2019. Pada unsur *why* mengenai sindiran dari Politikus terhadap tingkat kepatuhan Menteri Jokowi dalam melapor LHKPN. Terakhir pada unsur *how* mengenai perbandingan tingkat kepatuhan lapor LHKPN dengan tahun lalu, kepatuhan Menteri Jokowi berkisar 60 persen. Sedangkan, pada tahun ini 70 persen.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini terdapat unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu tanggapan dari Nufransa terhadap celetukan dari politikus demokrat Ferdinand Hutahaean terhadap Menteri era Presiden Jokowi belum ada satu pun yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Berdasarkan data dari KPK, Sri Mulyani termasuk Menteri yang patuh dalam melaporkan LHKPN. Kemudian, pada unsur koherensi penjelas dengan penggunaan kata “sementara”, “berdasarkan”, “dikutip”, “meski”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu penggunaan kata “dimukil” yang dimaksud mengutip. Lembaga “antirasuah” yang berarti KPK. “ditilik” yang berarti dilihat. Kemudian, pada elemen grafis penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada *headline* pemberitaannya serta menggunakan foto Menteri Keuangan Sri Mulyani.

E. Analisis Artikel Berita 5 Sebelum Pandemi Covid-19

Judul: Ini Kendala Lapo LHKPN Menurut Menteri Airlangga

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 17 April 2019

Ringkasan: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini seluruh menteri di Kabinet Kerja telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019. Menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, tidak ada kendala berarti baginya untuk menyerahkan LHKPN. Adapun persoalan yang dihadapi kebanyakan hanya soal teknis.

Tabel 4.10 Analisis Artikel Berita 5 Sebelum Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-----------------|--|
| Sintaksis | Judul | Ini Kendala Lapo LHKPN Menurut Menteri Airlangga |
| | Lead | Menteri Airlangga menyebutkan terdapat kendala dalam melapor LHKPN. |
| | Latar Informasi | Tidak adanya kendala yang berarti bagi Menteri Airlangga dalam melapor |

LHKPN, terdapat persoalan yang dihadapi hanya soal teknis seperti masalah pembebasan pajak dan yang lain.

| | |
|-------------------------|---|
| Kutipan Sumber | Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian): 1. “Saya rasa semua sudah menyerahkan”. 2. “Kami sudah menyerahkan”. 3. “Kan ada masalah pembebasan pajak dan yang lain, teknis saja. Belum kalau ada anaknya di luar negeri”. |
| Pernyataan Opini | Febri Diansyah (Juru Bicara KPK): 1. “Ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan kekayaannya”. - |
| Penutup | Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Febri Diansyah mengenai 31 Menteri yang telah melaporkan LHKPN kebanyakan menyerahkan LHKPN tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2019 dan ada sekitar tiga orang yang terlambat melaporkan LHKPN. |
| Skrip | Kendala melapor LHKPN menurut Menteri Airlangga |
| What | Jakarta |
| Where | 17 April 2019 |
| When | Airlangga Hartanto & Febri Diansyah |
| Who | Hanya ada kendala teknis yang dihadapi dalam melapor LHKPN |
| Why | Menteri Airlangga mengaku bahwa tidak ada kendala yang berarti untuk menyerahkan LHKPN dan mayakini |
| How | |

Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat

seluruh Menteri di Kabinet Kerja telah melaporkan LHKPN tahun 2019.

Unsur detail yaitu jajaran Menteri Kabinet Kerja telah melaporkan LHKPN tahun 2019 karena tidak ada kendala yang berarti menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. KPK menyatakan dari 34 Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf hanya ada tiga orang yang terlambat melaporkan LHKPN ke KPK. Unsur koherensi dalam pemberitaan ini terdapat koherensi penjas yaitu dengan penggunaan kata “meyakini”, “sudah”, “telah”. Unsur kata ganti yaitu “kami” yang dimaksud Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf

Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik

Struktur retorik dalam pemberitaan ini tidak memunculkan elemen leksikon dan hanya memunculkan elemen grafis yaitu penggunaan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta penggunaan foto Menteri Airlangga yang sedang diwawancarai.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menyampaikan informasi terkait kendala dalam melaporkan LHKPN menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan penulis yaitu “Ini Kendala Laporan LHKPN Menurut Menteri Airlangga”. Pada *lead* mengenai Menteri Airlangga menyebutkan terdapat kendala dalam melapor LHKPN. Kemudian, latar informasi mengenai tidak adanya kendala yang berarti menurut Menteri Airlangga dalam melapor LHKPN, hanya terdapat persoalan yang dihadapi soal masalah teknis seperti masalah pemberesan pajak dan yang lain. Penulis memasukan dua kutipan sumber yang pertama dari Menteri

Airlangga mengenai Menteri di Kabinet Kerja telah menyerahkan LHKPN tahun 2019 dan masalah teknis dalam melaporkan LHKPN seperti pemberesan pajak. Kemudian, kedua dari Febri Diansyah mengenai terdapat tiga orang Menteri yang belum melaporkan LHKPN di tahun 2019. Penutup dalam artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Febri Diansyah mengenai 31 Menteri yang tepat waktu dalam melaporkan LHKPN dan ada sekitar tiga orang yang terlambat melaporkan.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini terdapat unsur *what* mengenai kendala melapor LHKPN menurut Menteri Airlangga. Pada unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 17 April 2019. Kemudian, unsur *why* mengenai hanya ada kendala teknis yang dihadapi dalam melapor LHKPN. Unsur *how* menjelaskan mengenai Menteri Airlangga yang mengaku bahwa tidak ada kendala yang berarti untuk menyerahkan LHKPN dan meyakini bahwa seluruh Menteri di Kabinet Kerja telah melaporkan LHKPN tahun 2019.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini terdapat unsur detail yaitu jajaran Menteri Kabinet Kerja telah melaporkan LHKPN tahun 2019, karena tidak ada kendala yang berarti menurut Menteri Airlangga Hartanto. Kemudian, KPK menyatakan bahwa dari 34 Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf hanya ada tiga orang yang terlambat melaporkan LHKPN ke KPK. Pada unsur koherensi dalam pemberitaan ini terdapat koherensi penjas dengan penggunaan kata “meyakini”, “sudah”, “telah”. Lalu, unsur kata ganti yaitu “kami” yang dimaksud Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini tidak memunculkan elemen leksikon dan hanya memunculkan elemen grafis dengan penggunaan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta penulis menggunakan foto Menteri Airlangga yang sedang diwawancarai.

4.2.3 Analisis Framing Berita Kompas.com Saat Pandemi Covid-19

A. Analisis Artikel Berita 1 Saat Pandemi Covid-19

Judul: KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama.

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 10 September 2021

Ringkasan: Kekayaan pejabat penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi. Bahkan, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. Hal tersebut diketahui setelah KPK melakukan Analisa terhadap LHKPN selama setahun terakhir.

Tabel 4.11 Analisis Artikel Berita 1 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama. |
| | Lead | Kekayaan Pejabat penyelenggara negara mengalami kenaikan harta selama pandemic Covid-19, hal tersebut berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa jumlah pejabat negara hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. |
| | Latar Informasi | Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa kenaikan harta pejabat selama pandemi naik mencapai 70,3 persen. |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. “Kita amati juga selama pandemic setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah”. 2. “Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, Sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga”. 3. “Kita pikir pertambahannya masih wajar”. 4. “Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. |

Ternyata kita lihat kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi dengan statistic seperti ini”.

5. “Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya”.

6. “Kalau hibah rutin dia dapat dalam posisi sebagai pejabat, kita harus pertanyakan. Ini kenapa kok banyak orang baik hari memberikan hibah kepada yang bersangkutan”.

Pernyataan Opini

Pahala berpendapat bahwa kenaikan pundi-pundi uang para pejabat daerah masih terbilang wajar.

Penutup

Pada artikel ini ditutup dengan pernyataan Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengenai kenaikan harta yang bersumber dari hibah yang patut dicurigai.

Skrip

What

KPK Ungkap Kenaikan Harta Pejabat Bertambah Selama Pandemi

Where

Jakarta

When

10 September 2021

Who

Pahala Nainggolan

Why

Kenaikan Harta Pejabat Selama Pandemi Naik Mencapai 70,3 Persen Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menungkapkan kenaikan harta pejabat negara setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

How

| | | |
|----------------|---|---|
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail dalam pemberitaan ini menjelaskan terkait kenaikan harta pejabat mencapai 70,3 persen selama pandemi Covid-19. Selanjutnya selain mengalami kenaikan harta, KPK mencatat terdapat penurunan harta kekayaan penyelenggara negara maupun daerah. Unsur koherensi penjas dengan menggunakan kata hubung “setelah”, “pada”, “hingga”. Kata gantipada berita ini adalah “kita” yang mewakili KPK. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Dalam elemen leksikon dalam Kompas terdapat penggunaan kata “berjibaku” yang berarti berkeja keras dan “kendati” sebagai kata penghubung yang menandai hal tidak bersyarat serta pada elemen grafis Kompas menampilkan penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relatif besar pada <i>headline</i> berita tersebut dan menggunakan foto dengan jari tangan sedang menaiki tumpukan koin yang menyerupai anak tangga. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang menunjukkan pada gambaran berita ini adalah judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Kompas.com memberikan judul “KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi”. Dengan menggunakan kata yang singkat serta memberikan sebuah pemberitaan yang memiliki nilai perhatian yang cukup tinggi. Pada *lead*, Kompas.com ingin memberikan penekanan bahwa kekayaan penyelenggara negara mengalami kenaikan harta mencapai 70,3 persen selama pandemi Covid-19. Latar informasi yang tergambar menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat terdapat kenaikan harta penyelenggara negara selama pandemi Covid-19.

Terkait dengan kutipan sumber, penulis ingin menyampaikan bahwa selain kenaikan harta penyelenggara negara yang terjadi selama pandemi Covid-19, terdapat juga penurunan harta penyelenggara negara. Dalam pernyataan opini terdapat pendapat dari Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK menyebutkan bahwa kenaikan dari pundi-pundi uang para pejabat masih terbilang wajar. Lalu, berita tersebut ditutup dengan pernyataan Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengenai kenaikan harta yang bersumber dari hibah yang patut dicurigai

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip adalah 5W+1H, dalam pemberitaan ini yang diharapkan diambil oleh penulis untuk dilaporkan. Pada pemberitaan ini unsur *what* yaitu KPK mengungkap kenaikan harta pejabat bertambah selama pandemi. Unsur *where* yang berada di Jakarta. *When* pada 10 September 2021. Kemudian unsur *who* yang terkait dengan pemberitaan ini yaitu Pahala Nainggolan. Pada unsur *why* yaitu terdapat kenaikan harta pejabat selama pandemi yang mencapai 70,3 persen. Unsur *how* yaitu KPK mengungkapkan terdapat kenaikan harta pejabat negara setelah melakukan Analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa tersebut diungkapkan atau dilihat oleh penulis. Pada unsur detail yaitu menjelaskan kenaikan harta pejabat negara mencapai 70,3 persen selama pandemi Covid-19, selain mengalami kenaikan harta, KPK mencatat terdapat penurunan harta kekayaan penyelenggara negara maupun daerah. Unsur koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “setelah”, “pada”, “hingga”. Terdapat unsur Kata ganti pada berita ini adalah “kita” yang mewakili KPK.

4. Struktur Retoris

Struktur retorik berita ini memunculkan elemen leksikon dalam Kompas.com dengan penggunaan kata “berjibaku” yang berarti berkerja keras dan “kendati” sebagai kata penghubung yang menandai hal tidak bersyarat. Kemudian, pada elemen grafis Kompas.com menampilkan penebalan pada tulisan dan ukuran huruf

yang relatif besar pada judul berita. Serta menggunakan foto yang sesuai dengan pemberitaan.

B. Analisis Artikel Berita 2 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Ketua KPK: Ada 239 Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 07 September 2021

Ringkasan: Tercatat pada 6 September 2021, anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239, atau tingkat presentasi laporan baru 58 persen. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlie Bahuri mengungkapkan, sebanyak 239 Anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Tabel 4.12 Analisis Artikel Berita 2 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-----------------|--|
| Sintaksis | Judul | Ketua KPK: Ada 239 Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN. |
| | Lead | Sebanyak 239 anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). |
| | Latar Informasi | Salah satu kewajiban pejabat negara wajib untuk memberikan laporan tentang harta kekayaan baik sebelum, selama, dan setelah menduduki jabatan. |
| | Kutipan Sumber | Firlie Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi): 1. "Tercatat pada 6 September 2021, anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239, atau tingkat presentasi laporan baru 58 persen". 2. "Kami sungguh mengajak rekan-rekan penyelenggara negara untuk membuat dan melaporkan harta |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | | <p>kekayaannya, kenapa? karena tujuan mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktek-praktek korupsi”.</p> <p>3. “Kita sebagai warga negara, anak bangsa yang memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme”.</p> |
| | <p>Pernyataan Opini Penutup</p> | <p>- Pada artikel ini ditutup dengan kutipan sumber dari Firlil Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa sebagai warga negara yang memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah akan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> |
| <p>Skrip</p> | <p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> | <p>Anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara.</p> <p>Jakarta</p> <p>07 September 2021</p> <p>Firlil Bahuri</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi KPK tercatat sebanyak 239 anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaan.</p> |
| <p>Tematik</p> | <p>How</p> <p>Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</p> | <p>.Firlil Bahuri menyebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk memberikan laporan mengenai harta kekayaannya.</p> <p>Unsur detail pada pemberitaan ini menjelaskan terkait kepatuhan dan ketaatan membuat laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan di akhir menduduki masa jabatan dalam membuat laporan harta kekayaan. Kata ganti yang digunakan Kompas.com</p> |

Retoris**Kata, Idiom, Gambar,
Foto, Grafik**

adalah “Kami” yang berarti ketua KPK (Firli Bahuri) dalam mengajak pejabat negara untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya. Unsur koherensi yaitu terdapat kata hubung “setidaknya”, “selain itu”.

Pada struktur retorisi berita ini memunculkan elemen leksikon, Kompas.com menggunakan kata kolusi yang berarti kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan masyarakat atau negara dan nepotisme yang berarti setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan pribadi. Pada grafis, Kompas.com menggunakan pernyataan dari kutipan sumber dengan huruf besar dan penebalan pada *headline*.

Rincian Analisis**1. Struktur Sintaksis**

Struktur sintaksis pada gambaran berita ini adalah judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Kompas.com memberikan judul dalam pemberitaannya yaitu “Ketua KPK: Ada 239 Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN”. Dengan menggunakan penekanan pada kutipan sumber dari pihak KPK sebagai judul pemberitaan mengenai anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN sebanyak 239 orang. Pada *lead*, Kompas.com menggunakan *lead* deskriptif dengan membuat pembaca merasakan peristiwa yang diceritakan terlebih dahulu dan menonjolkan sebanyak dari 239 anggota DPR RI belum melaporkan LHKPN ke KPK. Kemudian pada Latar Informasi yaitu salah satu kewajiban dari pejabat negara adalah wajib memberikan laporan tentang harta kekayaannya baik sebelum, sesudah, selama, dan setelah menduduki masa jabatannya. Pada Kutipan Sumber, penulis ingin menyampaikan bahwa kewajiban melaporkan LHKPN untuk

menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dan tingkat presentase laporan dari DPR RI baru mencapai 58 persen yang dicatat pada 6 September 2021. Penutup dalam artikel ini merupakan kutipan sumber dari Firli Bahuri selaku Ketua KPK bahwa sebagai warga negara yang memiliki komitmen untuk melakukan pembertantasan dan tidak ramah akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan ini pada unsur *what* yaitu terdapat 239 anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Unsur *where* yang terjadi di Jakarta. Kemudian unsur *when* yang diberitakan pada 07 September 2021. Unsur *who* yaitu Firli Bahuri selaku Ketua KPK. Pada unsur *why* menjelaskan hasil penelitian dan evaluasi dari KPK tercatat sebanyak dari 239 anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaannya. Terakhir pada unsur *how* yaitu Firli Bahuri menyebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk memberikan laporan mengenai harta kekayaannya ke KPK.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam pemberitaan ini yang diamati pada peristiwa yang dilihat oleh penulis. Pada unsur detail yaitu dengan menjelaskan kepatuhan dan ketaatan membuat pelaporan LHKPN ke KPK merupakan hal wajib bagi pada pejabat negara sebelum, selama, dan diakhir menduduki masa jabatannya. Kemudian terdapat unsur kata ganti yaitu “Kami” yang berarti Ketua KPK (Firli Bahuri) dalam mengajak pejabat negara untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya. Selanjutnya pada unsur koherensi terdapat kata hubung “setidaknya”, dan “selain itu”.

4. Struktur Retoris

Struktur retorik dalam pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon pada Kompas.com dengan menggunakan kata “kolusi” yang berarti kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan masyarakat atau negara dan “nepotisme” yang berarti setiap perbuatan pejabat negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan pribadi. Pada elemen grafis, Kompas.com menggunakan pernyataan dari kutipan sumber sebagai judul pemberitaannya dan menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menggunakan foto Gedung DPR RI.

C. Analisis Artikel Berita 3 Saat Pandemi Covid-19

Judul: 4 Menteri Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 10 September 2021

Ringkasan: Sejumlah pejabat negara bahkan bertambah harta kekayaannya hingga 70,3 persen. Hal tersebut diketahui oleh KPK yang menyatakan bahwa harta pejabat negara bertambah di masa pandemi Covid-19. Bahkan, di tingkat kementerian, pertambahan rata-rata mencapai Rp 1 miliar.

Tabel 4.13 Analisis Artikel Berita 3 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | 4 Menteri Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK. |
| | Lead | Sejumlah pejabat negara ditingkat kementerian pertambahan harta rata-rata mencapai Rp. 1 miliar. |
| | Latar Informasi | Pertambahan harta ditingkat kementerian diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. “Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah”. |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK |
| Skrip | What | 4 Menteri Jokowi yang masuk ke daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK |
| | Where | Jakarta |
| | When | 10 September 2021 |
| | Who | Pahala Nainggolan, Sandiaga Uno, Sakti Wahyu Trenggono, Erick Tohir, Prabowo Subianto, Tahir, Hulu |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | Umzakirman, Nurhali, Muhammad Fajrin, Muhammad Mardiono, Jan Hider Oslannd. |
| | <i>Why</i> | KPK mencatat harta penyelenggara negara bertambah di masa pandemi Covid-19. |
| | <i>How</i> | Terdapat 4 menteri Jokowi yang masuk ke daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu terdapat 4 menteri Jokowi diantaranya yaitu Sandiaga Uno, Sakti Wahyu Trenggono, Erick Tohir, dan Prabowo Subianto yang masuk ke daftar pejabat terkaya versi LHKPN. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retoris berita ini memunculkan elemen grafis, Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam pemberitaan ini yaitu pada Kompas.com memberikan judul “4 Menteri Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK” dengan menonjolkan terdapat 4 Menteri Presiden Joko Widodo yang memiliki harta rata-rata mencapai Rp 1 Miliar. Pada *lead*, Kompas.com menggunakan jenis *lead* deskriptif dengan menceritakan kenaikan pejabat negara selama pandemi Covid-19 mengalami pertambahan harta hingga 70,3 persen dan menjelaskan terdapat pejabat negara ditingkat kementerian yang mengalami pertambahan harta rata-rata mencapai Rp 1 Miliar. Pada Latar Informasi, terdapat pertambahan harta ditingkat kementerian yang diungkap oleh KPK. Kutipan Sumber dalam pemberitaan ini yaitu penulis ingin menyampaikan terdapat pertambahan kekayaan penyelenggara negara sekitar 70 persen. Kemudian dalam Penutup artikel ini merupakan daftar pejabat ditingkat kementerian terkaya versi LHKPN KPK.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip merupakan 5W+1H, dalam pemberitaan ini unsur *what* yaitu 4 Menteri Jokowi yang masuk ke daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK. Pada unsur *where* berada di Jakarta. Unsur *when* pada 10 September 2021. Selanjutnya pada unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan, Sandiaga Uno, Sakti Wahyu Trenggono, Erick Tohir, Prabowo Subianto, Tahir, Hulu Umzakirman, Nurhali, Muhammad Fajrin, Muhammad Mardiono, Jan Hider Oslannd. Unsur *why* yaitu KPK mencatat harta penyelenggara negara bertambah dimasa pandemi Covid-19 mencapai 70 persen. Terakhir pada unsur *how* yaitu terdapat 4 Menteri Jokowi yang masuk ke dalam daftar pejabat terkakaya versi LHKPN KPK yang memiliki harta kekayaan rata-rata Rp 1 Miliar.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam pemberitaan ini yaitu pada unsur detail yaitu terdapat 4 Menteri Presiden Jokowi diantaranya Sandiaga Uno, Sakti Wahyu Trenggono, Erick Tohir, dan Prabowo Subianto yang masuk ke daftar pejabat terkata versi LHKPN yang memiliki harta kekayaan rata-rata Rp 1 Miliar disaat pandemi Covid-19.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam pemberitaan ini memunculkan elemen grafis, Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

D. Analisis Artikel Berita 4 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Presiden Jokowi Punya Harta Rp 63 Miliar, Naik Rp 8,8 Miliar Setahun Terakhir

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 10 September 2021

Ringkasan: Presiden RI Joko Widodo memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 63 Miliar. Apabila dibandingkan dengan LHKPN sebelumnya, harta Jokowi mengalami kenaikan sebesar Rp 8,8 Miliar. Pada tahun sebelumnya atau 2019, harta kekayaan Jokowi tercatat sebesar Rp 54 Miliar. Jokowi terakhir kali

menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 12 Maret 2021 atau laporan periodik tahun 2020.

Tabel 4.14 Analisis Artikel Berita 4 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | Presiden Jokowi Punya Harta Rp 63 Miliar, Naik Rp 8,8 Miliar Setahun Terakhir. |
| | <i>Lead</i> | Presiden RI Joko Widodo memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 63 Miliar setelah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 12 Maret 2021. |
| | Latar Informasi | Menampilkan Harta kekayaan Presiden RI Joko Widodo yang mencapai Rp. 64 Miliar yang diketahui berdasarkan data yang diakses Kompas.com pada situs LHKPN milik KPK. |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. “Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah”. 2. “Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga”. |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Pahala Nainggolan yang berisi pertambahan rata-rata harta Rp 1 miliar. Sebagian besar ada di tingkat kementerian. |
| Skrip | <i>What</i> | Harta kekayaan Presiden Jokowi naik Rp 8,8 Miliar dalam setahun terakhir dan mencapai Rp 63 Miliar |
| | <i>Where</i> | Jakarta |
| | <i>When</i> | 10 September 2021 |
| | <i>Who</i> | Joko Widodo, Pahala Nainggolan |

| | | |
|----------------|---|--|
| | Why | Tercatat pada tahun sebelumnya atau 2019 Presiden Joko Widodo memiliki harta kekayaan sebesar Rp 54 Miliar. |
| | How | Presiden Joko Widodo hartanya mengalami kenaikan Rp 8,8 Miliar dalam setahun terakhir setelah melaporkan LHKPN ke KPK pada laporan periodik tahun 2020. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yang ditampilkan Kompas.com adalah mengungkap sejumlah properti yang dimiliki oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada unsur koherensi penjas dengan menggunakan kata hubung “apabila”. Unsur kata ganti yaitu Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo dua periode yang dimaksud dengan Presiden RI Joko Widodo. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retoris pada berita ini memunculkan elemen grafis, Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menampilkan foto Presiden RI Joko Widodo. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam gambaran berita ini adalah Judul yang digunakan oleh Kompas.com yaitu “Presiden Jokowi Punya Harta Rp 63 Miliar, Naik Rp 8,8 Miliar Setahun Terakhir” dengan menggunakan kata yang singkat serta memberikan sebuah pemberitaan yang memiliki nilai perhatian yang cukup tinggi. Pada *lead*, Kompas.com ingin memberikan penekanan bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki harta kekayaan sebesar Rp 63 Miliar setelah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 12 Maret 2021. Pada Latar Informasi yang tergambar yaitu menampilkan harta kekayaan Presiden RI Joko Widodo yang mencapai Rp 63 Miliar yang diketahui berdasarkan data yang diakses dari

Kompas.com pada situs LHKPN milik KPK. Kemudian, pada Kutipan Sumber yang ditonjolkan oleh penulis dari Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK yang menjelaskan selama setahun terakhir secara umum penyelenggara negara hartanya bertambah sekitar 70 persen. Lalu, penulis menutup artikel ini dengan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan yang menjelaskan pertambahan harta rata-rata Rp 1 Miliar yang sebagian besar ada di tingkat kementerian.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip merupakan 5W+1H, dalam pemberitaan ini unsur *what* yaitu harta kekayaan Presiden Jokowi naik Rp 8,8 Miliar dalam setahun terakhir dan mencapai Rp 63 Miliar. Unsur *where* yang terjadi di Jakarta. Kemudian pada unsur *when* pada 10 September 2021. Unsur *who* yaitu Presiden Joko Widodo dan Pahala Nainggolan. Pada unsur *why* yaitu tercatat pada tahun sebelumnya atau 2019 Presiden Jokowi memiliki harta kekayaan sebesar Rp 54 Miliar. Terakhir pada unsur *how* yaitu Presiden Joko Widodo hartanya mengalami kenaikan Rp 8,8 Miliar dalam setahun terakhir setelah ia melaporkan LHKPN ke KPK pada laporan periodik tahun 2020.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik yang dapat diamati dari bagaimana sebuah peristiwa tersebut diungkap oleh penulis. Pada unsur detail yaitu dengan mengungkap sejumlah property yang dimiliki oleh Presiden RI Jokowi. Pada unsur koherensi dengan menggunakan koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “apabila” yang membandingkan kekayaan Presiden Jokowi pada tahun 2019 dan 2020. Unsur kata ganti yaitu “Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo” yang dimaksud dengan Presiden RI Joko Widodo.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik dalam pemberitaan ini memunculkan elemen grafis yaitu Kompas.com menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto dari Presiden Joko Widodo.

E. Analisis Artikel Berita 5 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Pejabat Tambah Kaya Selama Pandemi, KPK: Kalau yang Pengusaha Biasa Naik Turun

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 13 September 2021

Ringkasan: Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menyampaikan, naik turunnya kekayaan pejabat negara salah satunya disebabkan latar belakang pejabat tersebut. Sebagian dari para pejabat, menurut Pahala, memiliki latar belakang sebagai pengusaha, sehingga laporan harta kekayaan itu bisa mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 4.15 Analisis Artikel Berita 5 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|--|---|
| Sintaksis | <p>Judul</p> <p><i>Lead</i></p> <p>Latar Informasi</p> | <p>Pejabat Tambah Kaya Selama Pandemi, KPK: Kalau yang Pengusaha Biasa Naik Turun.</p> <p>Dalam kenaikan harta pejabat negara yang bertambah kaya yaitu memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Sehingga laporan harta kekayaan tersebut bisa mengalami kenaikan dan penurunan.</p> <p>Menurut Pahala Nainggolan terdapat sejumlah pejabat negara yang mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kekayaan selama pandemi Covid-19 berdasarkan catatan dari KPK</p> |
| | Kutipan Sumber | <p>Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK):</p> <p>1. “Kalau yang <i>background</i>-nya pengusaha sih biasa naik turun, (karena ada pejabat yang berlatar belakang pengusaha ya”.</p> |
| | Pernyataan Opini | - |

| | | |
|----------------|---|---|
| Penutup | Penutup | <p>Pada penutup dalam artikel ini merupakan data lima Menteri yang harta kekayaannya mengalami kenaikan selama pandemi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.</p> |
| Skrip | What | <p>Pejabat negara yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha pada laporan kekayaan hartanya dapat mengalami kenaikan dan juga penurunan disaat pandemi.</p> |
| | Where | <p>Jakarta</p> |
| | When | <p>13 September 2021</p> |
| | Who | <p>Pahala Nainggolan</p> |
| | Why | <p>Pejabat negara yang berlatar belakang sebagai pengusaha, laporan harta kekayaannya bisa naik dan turun.</p> |
| | How | <p>Adanya Menteri yang mengalami kenaikan pada jumlah harta kekayaan dan penurunan selama masa pandemi.</p> |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | <p>Pada unsur detail yaitu menjelaskan terdapat sekitar 58 persen Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 Miliar dan 26 persen Menteri yang kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 Miliar serta 3 persen pembantu Presiden Joko Widodo yang melaporkan harta kekayaannya mengalami penurunan. Pada unsur koherensi yang digunakan Kompas.com terdapat koherensi penjas dengan menggunakan kata</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | <p>hubung “sementara itu”, “yakni”, “dan”.</p> <p>Struktur retoris berita ini memunculkan elemen grafis dengan menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menampilkan foto kutipan sumber yaitu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat melakukan audiensi.</p> |
|----------------|--|--|

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis ingin menjelaskan penekanan dari kutipan sumber terkait dengan Pejabat Negara yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dapat mengalami kenaikan dan penurunan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut didukung dengan judul pemberitaan yang diberikan yaitu “Pejabat Tambah Kaya Selama Pandemi, KPK: Kalau yang Pengusaha Biasa Naik Turun”. Kemudian pada *lead* dan latar informasi menjelaskan terkait informasi tersebut bahwa kenaikan dan penurunan harta pejabat selama pandemi Covid-19 dipengaruhi dari latar belakangnya yang sebagai pengusaha. Hal tersebut juga didukung dari kutipan sumber dari Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang menyebutkan jika pejabat negara yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dapat naik dan turun harta kekayaannya. Lalu, penutup dalam artikel ini merupakan data dari lima Menteri yang hartanya mengalami kenaikan selama pandemi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan 5W+1H yang cukup jelas. Pada unsur *what* yaitu pejabat negara yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dapat mengalami kenaikan dan penurunan harta disaat pandemi Covid-19. Selanjutnya pada unsur *where* yang terjadi di Jakarta. Unsur

when pada 13 September 2021. Kemudian pada unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan. Unsur *why* menjelaskan pejabat negara yang berlatar belakang sebagai pengusaha, pada laporan harta kekayaannya bisa naik dan turun. Terakhir pada unsur *how* adanya Menteri yang mengalami kenaikan dan penurunan pada jumlah harta kekayaannya selama masa pandemi Covid-19.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini, pada unsur detail penulis ingin menjelaskan bahwa terdapat sekitar 58 Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 Miliar dan 26 persen Menteri yang kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 Miliar serta 3 persen pembantu Presiden Joko Widodo yang melaporkan harta kekayaannya mengalami penurunan. Kemudian pada unsur koherensi yang digunakan oleh Kompas.com yaitu terdapat koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “sementara itu”, “yakni”, “dan”.

4. Struktur Retoris

Dilihat dari struktur retorik dalam pemberitaan ini, terdapat elemen grafis yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul serta menampilkan foto Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK saat melakukan audiensi.

F. Analisis Artikel Berita 6 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 21 September 2021

Ringkasan: Pandemi Covid-19 mempengaruhi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia karena penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Dalam konteks pandemi, masyarakat kelompok bawah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dirumah. Sementara kelompok kaya sebaliknya tetap memiliki kesempatan meski di situasi pandemi dengan tetap bisa berkerja dari rumah dan memiliki akses yang selalu terpenuhi.

Tabel 4.16 Analisis Artikel Berita 6 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-----------------|---|
| Sintaksis | Judul | Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya. |
| | <i>Lead</i> | Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia dengan adanya penurunan aktivitas karena pandemi Covid-19 akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat kelompok bawah. Akan tetapi pada kelompok kaya sebaliknya memiliki kesempatan meski dalam situasi pandemi Covid-19. |
| | Latar Informasi | Pandemi Covid-19 membuat masyarakat kelompok bawah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya yang dilakukan di rumah. Sementara pada kelompok kaya memiliki akses untuk tetap bisa berkerja dari rumah. |
| | Kutipan Sumber | Teguh Dartanto (Dosen Universitas Indonesia): 1. “Dengan adanya <i>social distancing</i> dan pembatasan pergerakan manusia, fenomena sekarang ini ada ketimpangan dalam akses dunia digital. Ini akan mempengaruhi masa depan ketimpangan dan kemiskinan Indonesia”. 2. “Penurunan aktivitas orang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Pembatasan pergerakan memang akan menurunkan aktivitas ekonomi”. 3. “Dengan adanya pandemi, mereka tidak bisa bekerja menghasilkan uang. Mereka punya akses rendah terhadap internet sehingga implikasi, penghasilannya turun”. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | | <p>4. “Maka yang terjadi, ketimpangannya akan semakin tinggi. Fakta menunjukkan kekayaan pejabat naik, karena dia tidak ke mana-mana, penghasilan jalan, biaya turun, sedangkan masyarakat di bawah kesejahteraannya turun”.</p> <p>5. “Artinya <i>gap</i> ketimpangan semakin tinggi, kemiskinan tinggi”.</p> |
| | <p>Pernyataan Opini</p> | <p>Menurut Teguh dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat kelompok bawah tidak bisa berkerja menghasilkan uang</p> |
| | <p>Penutup</p> | <p>Penutup artikel ini berisi kutipan Teguh yang mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberi dampak ekonomi.</p> |
| <p>Skrip</p> | <p>What</p> | <p>Teguh Dartanto mengatakan bahwa pandemi Covid-19 pengaruhi ketimpangan dan pejabat negara bertambah kaya.</p> |
| | <p>Where</p> | <p>Jakarta</p> |
| | <p>When</p> | <p>21 September 2021</p> |
| | <p>Who</p> | <p>Teguh Dartanto</p> |
| | <p>Why</p> | <p>Ketimpangan saat pandemi Covid-19 pada masyarakat kelompok bawah dan pejabat.</p> |
| | <p>How</p> | <p>Ketimpangan masyarakat kelompok bawah yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan kelompok kaya tetap memiliki kesempatan dalam menghasilkan uang.</p> |
| <p>Tematik</p> | <p>Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</p> | <p>Unsur detail pada berita ini yaitu ketimpangan yang semakin tinggi antara kelompok masyarakat bawah disaat pandemi Covid-19 karena adanya penurunan aktivitas yang berdampak pada penurunan ekonomi.</p> |

Retoris

**Kata, Idiom, Gambar,
Foto, Grafik**

Namun, pada kelompok kaya masih memiliki kesempatan kebutuhan yang selalu terpenuhi meski saat pandemi Covid-19. Kata ganti pada artikel ini yaitu “kelompok kaya” yang dimaksud pejabat negara. Pada unsur koherensi terdapat koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “dengan”, “meski”, “hingga”, “pada”.

Struktur retorik artikel ini memunculkan elemen leksikon yaitu kata “ketimpangan” yang berarti kepincangan. Kompas.com menggunakan kata tersebut ke dalam judul pemberitaannya dan terdapat kata “adaptif” yang berarti kemampuan sosial seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dilingkungannya. Kompas.com menggunakan foto ilustrasi kemiskinan dalam artikel tersebut.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya” dengan menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi pejabat negara masih dapat melakukan aktivitas di rumah dan untuk masyarakat kelompok bawah yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya di rumah. Hal tersebut didukung dengan *lead* dan latar informasi bahwa ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia karena adanya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat kelompok bawah. Akan tetapi, pada kelompok kaya masih memiliki kesempatan dalam situasi pandemi Covid-19 dalam melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Selanjutnya penulis juga memasukan kutipan sumber dari Teguh Dartanto selaku Dosen Universitas Indonesia yang menjelaskan adanya ketimpangan dalam akses dunia digital kelompok kaya dan kelompok masyarakat

bawah. Kemudian dalam pernyataan opini dari Teguh menjelaskan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat kelompok bawah tidak bisa bekerja menghasilkan uang. Lalu, penutup dalam artikel ini yaitu berisi kutipan sumber dari Teguh yang menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini merupakan 5W+1H. Pada berita ini unsur *what* yaitu Teguh Dartanto mengatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi ketimpangan dan pejabat negara yang bertambah kaya. Unsur *where* yang berada di Jakarta. Kemudian pada unsur *when* pada 21 September 2021. Pada unsur *who* yaitu Teguh Dartanto dan pada unsur *why* menjelaskan ketimpangan disaat pandemi Covid-19 pada masyarakat kelompok bawah dan pejabat negara. Kemudian, pada unsur *how* yaitu pandemi Covid-19 mempengaruhi penurunan aktivitas masyarakat kelompok bawah dan kelompok kaya tetap memiliki kesempatan dalam menghasilkan uang disaat pandemi.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini, dalam unsur detail penulis menjelaskan terkait dengan ketimpangan yang semakin tinggi antara kelompok bawah disaat pandemi karena adanya penurunan aktivitas yang berdampak pada penurunan ekonomi. Namun, pada kelompok kaya masih memiliki kesempatan yang selalu terpenuhi kebutuhannya meski di saat pandemi Covid-19. Unsur kata ganti dalam pemberitaan ini yaitu “kelompok kaya” yang dimaksud dengan pejabat negara. Pada unsur koherensi terdapat koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “dengan”, “meski”, “hingga, dan “pada” dalam pemberitaan terkait dengan pandemi Covid-19 yang menjadi ketimpangan dan alasan pejabat negara bertambah kaya.

4. Struktur Retoris

Struktur retorik dalam pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu kata “ketimpangan: yang berarti kepincangan. Penulis juga menggunakan kata tersebut ke dalam judul pemberitaannya dan terdapat kata “adaptif” yang berarti kemampuan sosial seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian penulis juga menggunakan foto ilustrasi kemiskinan dalam artikel tersebut.

G. Analisis Artikel Berita 7 Saat Pandemi Covid-19

Judul: KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung Turun

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 18 Agustus 2021

Ringkasan: Tingkat kepatuhan anggota legislatif menurun drastis pada pelaporan LHKPN Maret 2021 di DPR tinggal 55 persen dan yang DPRD tinggal 90 persen. Hal tersebut dibandingkan pada pelaporan LHKPN Maret 2020 anggota legislatif dulu 100 persen DPR dan DPRD.

Tabel 4.17 Analisis Artikel Berita 7 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|--|--|
| Sintaksis | <p>Judul</p> <p><i>Lead</i></p> <p>Latar Informasi</p> | <p>KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung Turun. Pahala Nainggolan sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan bahwa LHKPN anggota legislatif baik DPR maupun DPRD menurun drastis.</p> <p>Kepatuhan pelaporan LHKPN lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD dulu mencapai 100 persen. Akan tetapi, DPR sekarang hanya 55 persen dan yang DPRD tinggal 90 persen.</p> |
| | Kutipan Sumber | <p>Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Untuk legislatif ternyata menurun drastis, legislatif dulu 100 persen DPR dan DPRD, sekarang yang DPR itu jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen”. 2. “Tahun 2020 jatuh tempo pelaporannya adalah Maret 2021, itu sudah kita kumpulkan sampai pertengahan Juni, rata-rata kepatuhannya sudah 96 persen, lebih baik dibanding tahun kemarin”. |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | 3. “Jadi, artinya kita lihat mungkin dengan pelaporan <i>full</i> elektronik lebih sederhana”. |
| | Pernyataan Opini | Pahala Nainggolan mengatakan bahwa anggota legislatif cenderung melaporkan harta kekayaannya saat akan mengikuti pemilihan umum sebagai syarat pencalonan. |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Pahala Nainggolan mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara yang akan dilakukan secara online. |
| Skrip | What | Pahala Nainggolan membandingkan kepatuhan pelaporan LHKPN anggota legislatif pada Maret 2020 dengan Maret 2021. |
| | Where | Jakarta |
| | When | 18 Agustus 2021 |
| | Who | Pahala Nainggolan |
| | Why | Penurunan pelaporan LHKPN lembaga legislatif pada Maret 2021. |
| | How | Pelaporan LHKPN lembaga legislatif DPR dan DPRD menurun drastis dibandingkan dengan pelaporan tahun lalu. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Pada unsur detail yang berusaha ditampilkan Kompas.com yaitu penurunan pelaporan DPR dan DPRD pada tahun 2021 serta cenderung melaporkan harta kekayaannya saat akan mengikuti pemilihan umum sebagai salah satu syarat pencalonan. Unsur koherensi terdapat penggunaan koherensi penjas yaitu “jadi”, “membandingkan”, “hingga”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Terdapat elemen leksikon yaitu kata menurun drastis yang menegaskan isi |

berita. Pada elemen grafis yang ditampilkan Kompas.com yaitu pada judul menggunakan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai kepatuhan pelaporan anggota legislatif yang cenderung turun serta menggunakan foto Pahala Nainggolan dalam artikel berita.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis ingin menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota legislatif yang cenderung turun yang disebut oleh Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK. Hal tersebut ditekankan oleh penulis pada judul yaitu “KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung Turun”. Kemudian pada *lead* dan latar informasi yang dijelaskan penulis yaitu berisikan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan mengenai kepatuhan anggota legislatif baik DPR dan DPRD mengalami penurunan drastis. Hal tersebut didukung juga dari kutipan sumber dari Pahala Nainggolan yang digunakan oleh penulis mengenai kepatuhan LHKPN anggota legislatif dulu mencapai 100 persen, sekarang DPR tinggal 50 persen dan yang DPRD 90 persen. Pada pernyataan opini yaitu dari Pahala Nainggolan mengatakan bahwa anggota legislatif cenderung melaporkan harta kekayaannya saat akan mengikuti pemilu sebagai syarat pencalonan. Lalu, penutup artikel ini merupakan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang akan dilakukan secara *online*.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan unsur 5W+1H. Dalam unsur *what* yaitu Pahala Nainggolan membandingkan kepatuhan LHKPN anggota legislatif pada tahun 2020 dan 2021. Unsur *where* berada di Jakarta dan pada unsur *when* terjadi pada 18 Agustus 2021. Kemudian pada unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan. Selanjutnya pada unsur *why* merupakan penurunan

pelaporan LHKPN lembaga legislatif DPR dan DPRD pada tahun 2021. Lalu, pada unsur *how* yaitu pelaporan LHKPN lembaga legislatif DPR dan DPRD menurun drastis dibandingkan dengan pelaporan pada tahun lalu.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik dalam pemberitaan ini, pada unsur detail penulis berusaha menampilkan penurunan pelaporan LHKPN yang terjadi pada anggota legislatif DPR dan DPRD pada tahun 2021 serta cenderung untuk melaporkan harta kekayaannya saat akan mengikuti pemilihan umum sebagai salah satu syarat pencalonan. Pada unsur koherensi penulis menggunakan koherensi penjelas yaitu “jadi”, “membandingkan”, “hingga” dari suatu paragraf ke paragraf selanjutnya yang berkesinambungan.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris terdapat elemen leksikon yang digunakan oleh penulis yaitu kata “menurun drastis” yang menegaskan isi keseluruhan berita. Pada elemen grafis yang ditampilkan oleh penulis yaitu pada judul yang menggunakan kutipan sumber dari Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai kepatuhan dari pelaporan anggota legislatif yang cenderung mengalami penurunan serta menggunakan foto Pahala Nainggolan dalam pemberitaan tersebut.

H. Analisis Artikel Berita 8 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Sumber: Kompas.com

Tanggal: 06 Desember 2021

Ringkasan: Febri Diansyah selaku mantan Juru Bicara KPK memperlihatkan bahwa harta kekayaan Ghufron mengalami kenaikan harta Rp 6,7 miliar jika dibandingkan saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Jember. Ghufron menyatakan bahwa pertambahan hartanya tersebut terjadi karena aset yang dimilikinya berupa properti.

Tabel 4.18 Analisis Artikel Berita 8 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|--|--|
| Sintaksis | <p>Judul</p> <p><i>Lead</i></p> <p>Latar Informasi</p> | <p>Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar.</p> <p>Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempertanyakan kenaikan harta Nurul Ghufon setelah menjadi seorang komisioner lembaga antirasuah.</p> <p>Kekayaan Nurul Ghufon pada laporan periodik LHKPN 13 Desember 2020 yaitu senilai Rp. 13 Miliar.</p> |
| | Kutipan Sumber | <p>Febri Diansyah (Mantan Juru Bicara KPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Pak, apakah data ini benar dan bisa dijelaskan? Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, ada baiknya Pimpinan KPK jadi contoh keterbukaan tentang asal-usul kekayaan berasal dari penghasilan sah”. 2. “Jika dilihat data e-lhkn KPK yang bersifat terbuka ini, saat jadi Dekan kekayaan Nurul Ghufon total Rp 6,7 miliar. Sampai saat ini sejak jadi Dekan dan selama jadi Pimpinan KPK, total kenaikan Rp 6,7 miliar”. 3. “Faktor apa? Setahu saya, kenaikan kekayaan bisa terjadi karena naiknya nilai pasar aset atau penambahan aset. Hal itu tentu bisa dijelaskan dengan mudah, Ya bisa juga sekaligus sebagai contoh prinsip transparansi pejabat publik. Bagian dari pencegahan korupsi”. <p>Nurul Ghufon (Wakil Ketua KPK):</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p>1. “Perlu saya jelaskan, aset saya kebanyakan properti tanah dan bangunan yang saya beli dari lelang negara, sehingga harga pembeliannya relatif murah”.</p> <p>2. “Selanjutnya saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kosan, kadang saya jual kembali setelah renovasi”.</p> |
| | Pernyataan Opini | <p>Febri Dianysah menduga kenaikan harta dari Nurul Ghufron terjadi bukan karena gaji sebagai pimpinan KPK, melainkan terdapat faktor lainnya.</p> |
| | Penutup | <p>Penutup dalam artikel ini merupakan pernyataan dari Nurul Ghufron yang telah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN.</p> |
| Skrip | What | <p>Mantan Juru Bicara KPK mempertanyakan harta kekayaan Nurul Ghufron.</p> |
| | Where | <p>Jakarta</p> |
| | When | <p>06 Desember 2021</p> |
| | Who | <p>Febri Diansyah dan Nurul Ghufron</p> |
| | Why | <p>Febri Diansyah mempertanyakan kenaikan harta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</p> |
| | How | <p>Kekayaan harta dari Nurul Ghufon tercatat memiliki harta berupa 13 lahan dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, kas, dan hutang. sehingga total nilai harta mencapai Rp 13 Miliar.</p> |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | <p>Unsur detail pada pemberitaan ini yaitu Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempertanyakan asal usul kenaikan harta Nurul Ghufron bukan karena gaji sebagai pimpinan KPK, melainkan ada faktor lain dari kenaikan harta tersebut seperti naiknya nilai</p> |

Retoris

Kata, Idiom, Gambar,
Foto, Grafik

pasar aset atau penambahan aset yang dapat dijelaskan dengan mudah serta menampilkan aset yang dimiliki oleh Nurul Ghufron. Unsur koherensi yaitu koherensi penjelas dengan penggunaan kata “berupa”, “tercata”, “berdasarkan”. Kemudian pada kata ganti yaitu “aktivis antikorupsi” yang dimaksud Febri Diansyah.

Pada artikel ini memunculkan elemen leksikon yaitu dengan kalimat pernyataan jumlah harta dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Elemen grafis yaitu penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relative besar pada *headline* berita tersebut. Dalam berita ini Kompas.com menampilkan foto Nurul Ghufron yang sedang ditemui di Gedung merah putih KPK.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam pemberitaan ini penulis ingin menginformasikan terkait dari kenaikan harta kekayaan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon yang memiliki 13 lahan hingga bangunan senilai Rp 11 Miliar. Hal tersebut didukung oleh judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar”. Pada *lead* artikel ini merupakan Mantan Juru Bicara KPK yang mempertanyakan kenaikan harta dari Nurul Ghufron setelah menjadi komisioner lembaga antirasuah. Dalam Latar Informasi menjelaskan kekayaan Nurul Ghufron pada laporan periodik LHKPN 13 Desember 2021 yaitu senilai Rp 13 Miliar. Hal tersebut didukung juga dengan kutipan sumber dari Febri Diansyah mengenai asal-usul kekayaan yang diperoleh dari Nurul Ghufron yang terus mengalami kenaikan. Kemudian terdapat kutipan sumber dari Nurul Ghufron yang menjelaskan harta kekayaan yang naik tersebut karena aset properti tanah dan bangunan yang dimiliki.

Selanjutnya dalam pernyataan opini merupakan ungkapan dari Febri Diansyah yang menduga kenaikan harta dari Nurul Ghufron bukan dari gajinya sebagai pimpinan KPK. Dalam penutup artikel ini merupakan pernyataan dari Nurul Ghufron yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* yaitu Febri Diansyah mempertanyakan kenaikan harta dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Unsur *where* yang berada di Jakarta dan pada unsur *when* terjadi pada 06 Desember 2021. Unsur *who* yaitu Febri Diansyah dan Nurul Ghufron. Pada unsur *why* merupakan kenaikan harta Wakil Ketua KPK yang dipertanyakan asal-usulnya oleh Febri Diansyah. Dalam unsur *how* merupakan kekayaan dari Nurul Ghufron tercatat memiliki harta berupa 13 lahan dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, kas, dan hutang. Sehingga total nilai harta kekayaannya mencapai Rp 13 Miliar.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini terdapat unsur detail yaitu Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang mempertanyakan asal-usul kenaikan harta Nurul Ghufron bukan karena gaji sebagai pimpinan KPK, melainkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi kenaikan hartanya tersebut seperti naiknya nilai pasar aset atau penambahan aset. Unsur koherensi yang digunakan oleh penulis yaitu koherensi penjas dengan penggunaan kata “berupa”, “tercatat”, “berdasarkan”. Kemudian pada unsur kata ganti yaitu “aktivis antikorupsi” yang dimaksud Febri Diansyah.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yaitu dengan menonjolkan kalimat pernyataan jumlah harta dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Pada elemen grafis yaitu penebalan tulisan dan huruf besar pada *headline* pemberitaan. Dalam berita ini penulis menampilkan foto Nurul Ghufron yang sedang ditemui di Gedung Merah Putih KPK.

4.2.4 Analisis Framing Berita Tempo.co Saat Pandemi Covid-19

A. Analisis Artikel Berita 1 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Ada Kenaikan Harta Menteri dan DPR Rp 1 M Selama Pandemi, KPK: Masih Wajar

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 07 September 2021

Ringkasan: Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa selama Pandemi, sebanyak 70,3 persen Penyelenggara Negara melaporkan terjadinya kenaikan harta. Kenaikan nilai harta penyelenggara negara terjadi antara lain disebabkan apresiasi nilai aset dan penurunan nilai harta meliputi depresiasi nilai aset.

Tabel 4.19 Analisis Artikel Berita 1 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | Ada Kenaikan Harta Menteri dan DPR Rp 1 M Selama Pandemi, KPK: Masih Wajar. |
| | Lead | Pahala Nainggolan mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat 70,3 persen Penyelenggara Negara melaporkan terjadinya kenaikan harta. |
| | Latar Informasi | Hasil analisis LHKPN 2019-2020 yang mengalami penambahan sekitar Rp 1 Miliar masih tergolong wajar. |
| | Kutipan Sumber | <p>Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Menurut hasil analisis LHKPN 2019-2020, angka tersebut masih tergolong wajar”. 2. “Kalau naik secara signifikan karena nilai PBB-nya dinaikkan, atau misalkan terjadi pengusuran seperti jalan tol, pasti akan menunjukkan apresiasi nilai aset yang (juga) signifikan”. 3. “Kami juga banyak mendapati pejabat negara yang mengalami penurunan (nilai harta), bisa jadi ada depresiasi nilai aset, seperti kendaraan, |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | yang pasti asetnya semakin lama semakin menurun, atau penambahan hutang”. |
| | | 4. “Kalau hartanya tinggi bukan berarti seseorang korupsi, dan kalau rendah bukan berarti bersih, tetapi pada intinya detail harta harus dilihat, apakah profil (seorang pejabat publik) cocok dengan hartanya”. |
| | Pernyataan Opini | Kenaikan harta mencapai Rp 1 Miliar Menteri dan DPR selama pandemi Covid-19 masih terbilang wajar menurut Pahala Nainggolan. |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan ajakan Pahala Nainggolan kepada masyarakat untuk memantau laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui <i>E-announcement</i> yang dapat diakses dari situs resmi KPK. Hal tersebut merupakan alat pencegahan korupsi. |
| Skrip | What | Pahala Nainggolan menyebut kenaikan harta Penyelenggara selama pandemi masih terbilang wajar. |
| | Where | Jakarta |
| | When | 07 September 2021 |
| | Who | Pahala Nainggolan |
| | Why | Kenaikan harta Menteri dan DPR mencapai Rp 1 Miliar selama pandemi. |
| | How | Terdapat beberapa penyebab dari kenaikan atau penurunan nilai harta penyelenggara. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu ungkapan dari Pahala Nainggolan tentang kenaikan harta Menteri dan DPR yang masih tergolong wajar, karena terdapat penyebab dari kenaikan harta seperti apresiasi nilai aset, penambahan aset |

Retoris**Kata, Idiom, Gambar,
Foto, Grafik**

dan penurunan nilai harta yaitu depresiasi nilai aset, pelepasan aset, penambahan nilai hutang. Unsur koherensi yaitu koherensi sebab akibat menggunakan kata hubung “disebabkan” dan “penyebab”.

Pada struktur retorik ini memunculkan elemen leksikon yang digunakan dalam berita Tempo.co yaitu terdapat penggunaan kata “apresiasi” merupakan nilai aset yang meningkat dan “depresiasi” merupakan nilai aset yang menurun. Pada elemen grafis Tempo.co menggunakan huruf tebal dan besar dalam penulisan judul.

Rincian Analisis**1. Struktur Sintaksis**

Pada struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis ingin menjelaskan mengenai terjadinya kenaikan harta Menteri dan DPR mencapai Rp 1 Miliar selama pandemi Covid-19 yang disebutkan oleh pihak KPK sebagai kutipan sumber yang terbilang masih wajar. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberitakan yaitu “Ada Kenaikan Harta Menteri dan DPR Rp 1 M Selama Pandemi, KPK: Masih Wajar”. Pada *lead* yang ditonjolkan oleh penulis dengan menggunakan jenis *lead* ringkasan dimana pembaca dapat mengerti isi keseluruhan berita dengan menyebutkan terdapat kenaikan harta penyelenggara negara selama pandemi sebesar 70,3 persen. Latar Informasi menjelaskan kenaikan harta tersebut merupakan hasil dari analisis KPK pada LHKPN 2019-2020 yang mengalami penambahan harta sekitar Rp 1 Miliar yang tergolong wajar. Dalam kutipan sumber oleh Pahala Nainggolan yang dimuat oleh penulis yaitu mengenai kenaikan harta Rp 1 Miliar masih tergolong wajar menurut Pahala Nainggolan. Selanjutnya dalam pernyataan opini merupakan kenaikan harta Rp 1 Miliar masih tergolong wajar. Pada penutup dalam artikel ini merupakan ajakan dari Pahala Nainggolan kepada masyarakat untuk memantau laporan harta kekayaan pejabat negara melalui *E-announcement* yang dapat diakses dari situs resmi KPK.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* mengenai Pahala Nainggolan menyebut kenaikan harta penyelenggara selama pandemi masih terbilang wajar. Unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 07 September 2021. Kemudian unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan. Unsur *why* menjelaskan kenaikan harta Menteri dan DPR mencapai Rp 1 Miliar selama pandemi Covid-19. Terakhir pada unsur *how* merupakan adanya beberapa penyebab dari kenaikan atau penurunan nilai harta kekayaan penyelenggara.

3. Struktur Tematik

Dilihat dari struktur tematik dalam pemberitaan ini, pada unsur detail menjelaskan ungkapan dari Pahala Nainggolan mengenai kenaikan harta Menteri dan DPR yang masih tergolong wajar, karena penyebab dari kenaikan harta seperti apresiasi nilai aset, penambahan aset dan pada penurunan harta kekayaan terjadi karena depresiasi nilai aset, pelepasan aset. Dalam unsur koherensi penulis menggunakan koherensi sebab akibat dengan menggunakan kata “disebabkan” dan “penyebab”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yang digunakan oleh penulis yaitu penggunaan kata “apresiasi” merupakan nilai aset yang meningkat dan “depresiasi” merupakan penurunan nilai aset. Pada elemen grafis, penulis menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menggunakan foto Pahala Nainggolan yang ditemui oleh Tempo saat berada diruangannya.

B. Analisis Artikel Berita 2 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Kepatuhan DPR Sampaikan LHKPN Turun, Harta Kekayaan Apa Saja Wajib Laporan?

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 08 September 2021

Ringkasan: Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami penurunan dengan tingkat presentase yang melapor baru 58 persen. Dalam LHKPN terdapat beberapa

kekayaan yang harus dilaporkan yaitu harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, deposito, giro, piutang, hutang, penghasilan dari jabatan, dan lain-lain.

Tabel 4.20 Analisis Artikel Berita 2 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | Kepatuhan DPR Sampaikan LHKPN Turun, Harta Kekayaan Apa Saja Wajib Laport? |
| | Lead | Firli Bahuri Ketua KPK mengatakan bahwa tingkat kepatuhan dari anggota DPR mengalami penurunan pelaporan. |
| | Latar Informasi | Pelaporan LHKPN yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. |
| | Kutipan Sumber | Firli Bahuri (Ketua KPK): 1. "Ada 239 anggota Dewan (DPR) yang belum melaporkan LHKPN atau tingkat persentase yang melapor baru 58 persen". |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan beberapa kekayaan yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara dalam LHKPN. |
| Skrip | What | Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kepatuhan anggota DPR mengalami penurunan dalam melaporkan harta kekayaan ke LHKPN. |
| | Where | Jakarta |
| | When | 08 September 2021 |
| | Who | Firli Bahuri |
| | Why | Kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN mengalami penurunan |
| | How | Ada 239 anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN atau tingkat presentase yang melapor baru 58 persen. |

| | | |
|----------------|---|---|
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail pada artikel ini yaitu harta kekayaan apa saja yang harus dilaporkan penyelenggara negara dalam LHKPN. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik, elemen leksikon yang digunakan dalam berita ini mencerminkan mengenai isi berita secara keseluruhan apa adanya serta penggunaan foto aksi pemanjat profesional yang memasang spanduk bertuliskan lapor harta kekayaan lebih mudah. Elemen grafis yang digunakan Tempo.co yaitu penggunaan kalimat pertanyaan pada judul pemberitaannya. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis yang menunjukkan sebuah gambaran berita ini pada Judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Kepatuhan DPR Sampaikan LHKPN Turun, Harta Kekayaan Apa Saja Wajib Lapor?” dengan menjelaskan penurunan tingkat kepatuhan DPR dalam menyampaikan LHKPN ke KPK. Hal tersebut juga didukung dengan *lead* yang dijelaskan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan DPR mengalami penurunan. Pada Latar Informasi menjelaskan pelaporan LHKPN harus dilaporkan oleh penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Dalam kutipan sumber yang digunakan oleh penulis yaitu kutipan dari Firli Bahuri dengan menjelaskan terdapat 239 anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN atau tingkat presentase yang baru melapor hanya 58 persen. Kemudian artikel ini ditutup dengan beberapa kekayaan yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara ke LHKPN.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini sudah mencakup 5W+1H, pada unsur *what* mengenai ungkapan Firli Bahuri yang menjelaskan kepatuhan anggota DPR mengalami penurunan dalam melaporkan harta kekayaannya. Unsur *where* terjadi di Jakarta dan unsur *when* pada 08 September 2021. Kemudian pada unsur *who*

yaitu Firli Bahuri dan pada unsur *why* menjelaskan kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN mengalami penurunan. Unsur *how* terdapat 239 anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini pada unsur detail menjelaskan harta kekayaan apa saja yang harus dilaporkan penyelenggara negara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seperti harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, tabungan, piutang, hutang, penghasilan dari jabatan dan lain sebagainya.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yang digunakan penulis yaitu berita ini mencerminkan isi berita secara keseluruhan apa adanya mengenai harta apa saja yang wajib dilaporkan oleh pejabat negara. Serta penggunaan foto aksi pemanjat profesional yang memasang spanduk bertuliskan “lapor harta kekayaan lebih mudah”. Pada elemen grafis yaitu penggunaan kalimat pertanyaan pada judul pemberitaannya.

C. Analisis Artikel Berita 3 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Mengintip Harta 5 Menteri Paling Tajir di Pemerintahan Jokowi

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 09 September 2021

Ringkasan: Sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi memiliki kekayaan di atas Rp 1 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada 70 persen pejabat negara yang hartanya naik selama pandemi. Terdapat 5 menteri Presiden Jokowi yang hartanya paling banyak berdasarkan laporan terakhir 31 Desember 2020 yaitu Sandiaga Uno, Wahyu Sakti Trenggono, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Nadiem Makarim.

Tabel 4.21 Analisis Artikel Berita 3 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-----------------|--|
| Sintaksis | Judul | Mengintip Harta 5 Menteri Paling Tajir di Pemerintahan Jokowi. |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Lead | Memiliki kekayaan di atas Rp 1 triliun, sejumlah Menteri di pemerintahan Jokowi mencatatkan sedikit penurunan kekayaan dan ada yang bertambah. |
| | Latar Informasi | KPK mencatat terdapat 70 persen pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan selama pandemi |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. "Kami amati selama pandemi satu tahun terakhir secara umum 70 persen penyelenggara negara hartanya bertambah". |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Pada artikel ini ditutup dengan deretan 5 Menteri Presiden Jokowi yang memiliki kekayaan di atas Rp 1 Triliun. |
| Skrip | What | 5 Menteri paling kaya di pemerintahan Jokowi |
| | Where | Jakarta |
| | When | 09 September 2021 |
| | Who | Pahala Nainggolan, Sandiaga Uno, Wahyu Sakti, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Nadiem Makarim. |
| | Why | 5 Menteri di pemerintahan Jokowi memiliki harta kekayaan di atas Rp 1 Triliun. |
| | How | KPK mencatat terdapat pejabat negara yang hartanya naik dan turun selama pandemi Covid-19. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail pada artikel ini yaitu menampilkan sejumlah harta kekayaan 5 Menteri di pemerintahan Jokowi yang mengalami penambahan dan penurunan harta kekayaan dibandingkan dengan tahun lalu. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik yaitu memunculkan elemen leksikon dengan penggunaan |

kata “tajir” yang berarti kaya pada judul pemberitaan. Lalu terdapat elemen grafis yang menggunakan penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relatif besar serta menggunakan foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin sedang mengumumkan enam orang calon Menteri baru.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, Judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Mengintip Harta 5 Menteri Paling Tajir di Pemerintahan Jokowi” dengan menjelaskan terdapat 5 Menteri yang paling kaya di pemerintahan Jokowi berdasarkan laporan terakhir pada 31 Desember 2020. Dalam *lead* mengenai sejumlah Menteri di pemerintahan Jokowi mencatat sedikit penurunan kekayaan dan ada yang harta kekayaannya bertambah. Latar Informasi menjelaskan KPK mencatat terdapat 70 persen kekayaan pejabat negara bertambah selama pandemi Covid-19. Pada kutipan sumber yang digunakan oleh penulis yaitu kutipan dari Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK dengan menjelaskan kekayaan pejabat selama pandemi bertambah secara umum sekitar 70 persen. Penutup dalam artikel ini merupakan deretan 5 Menteri Jokowi yang memiliki harta kekayaan di atas Rp 1 Triliun.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah mencakup unsur 5W+1H. Pada unsur *what* yaitu menjelaskan 5 Menteri yang paling kaya di pemerintahan Jokowi. Kemudian pada unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 09 September 2021. Unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan, Sandiaga Uno, Wahyu Sakti, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Nadiem Makarim. Lalu, unsur *why* mengenai 5 Menteri di pemerintahan Jokowi yang memiliki harta kekayaan di atas Rp 1 Triliun. Pada unsur *how* mengenai KPK mencatat terdapat pejabat negara yang hartanya naik dan turun selama pandemi.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik dalam pemberitaan ini, unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu menampilkan sejumlah kekayaan dari 5 Menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengalami pertambahan dan penurunan harta kekayaan dibandingkan dengan tahun lalu.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik memunculkan elemen leksikon dengan penggunaan kata “tajir” yang berarti kaya dalam judul pemberitaan. Kemudian pada elemen grafis penulis menggunakan huruf besar dan penebalan pada judul pemberitaan serta menampilkan foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sedang mengumumkan enam orang calon Menteri baru.

D. Analisis Artikel Berita 4 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Kekayaan Jokowi Naik Setahun Terakhir, Punya Koleksi 7 Mobil dan 1 Motor

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 09 September 2021

Ringkasan: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatatkan sebanyak 73 persen harta kekayaan pejabat negara naik dalam setahun terakhir. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tercatat harta kekayaan Jokowi meningkat sekitar Rp8,9 miliar dalam setahun terakhir. Berdasarkan laporan periodik 2020, yang disampaikan pada 13 Maret 2021, total harta kekayaan Jokowi mencapai Rp 63 Miliar.

Tabel 4.22 Analisis Artikel Berita 4 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-----------------|---|
| Sintaksis | Judul | Kekayaan Jokowi Naik Setahun Terakhir, Punya Koleksi 7 Mobil dan 1 Motor |
| | Lead | KPK mencatat sebanyak 73 persen harta kekayaan pejabat negara dalam setahun terakhir mengalami kenaikan harta kekayaan. |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Latar Informasi | Presiden RI Joko Widodo tercatat memiliki harta kekayaan yang meningkat sekitar Rp 8,9 Miliar dalam setahun terakhir. |
| | Kutipan Sumber | Tidak adanya kutipan sumber |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Penutup dalam artikel ini merupakan daftar koleksi kendaraan milik Jokowi yang berdasarkan data LHKPN. |
| Skrip | What | Kekayaan Jokowi Naik dalam setahun terakhir |
| | Where | Jakarta |
| | When | 09 September 2021 |
| | Who | Presiden RI Joko Widodo |
| | Why | Kenaikan harta pejabat negara selama pandemi Covid-19 mencapai 73 persen. |
| | How | Presiden RI Joko Widodo mengalami peningkatan harta selama pandemi Rp 8,9 Miliar dengan total kekayaan mencapai Rp 63 Miliar. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail pada Tempo.co yaitu kekayaan harta orang nomor satu di tanah air yaitu Presiden RI Joko Widodo mencapai Rp 63 Miliar tetapi tidak memiliki kendaraan yang mewah. Unsur kata ganti yaitu “orang nomor satu di tanah air” yang dimaksud Presiden RI Joko Widodo. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Pada struktur retorik ini, unsur grafis yang ditampilkan oleh Tempo.co yaitu penebalan pada judul dan huruf besar serta menggunakan foto Presiden Jokowi yang sedang turun dari dalam mobil kepresidenan. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis dalam pemberitaan ini, penulis menjelaskan sebanyak 73 persen harta kekayaan pejabat negara naik dalam setahun terakhir, salah satunya adalah Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan yaitu “Kekayaan Jokowi Naik Setahun Terakhir, Punya Koleksi 7 Mobil dan 1 Motor”. Pada *lead* menjelaskan KPK mencatat sebanyak 73 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama setahun terakhir. Dalam pemberitaan ini Tempo menggunakan jenis *lead* ringkasan dengan membaca *lead* tersebut pembaca dapat mengetahui isi keseluruhan berita. Kemudian pada Latar Informasi menjelaskan Presiden Jokowi tercatat memiliki harta kekayaan yang bertambah sekitar Rp 8,9 Miliar dalam setahun terakhir. Kemudian penulis tidak mencantumkan kutipan sumber dalam artikel ini. Pada penutup artikel ditutup dengan daftar koleksi kendaraan milik Presiden Jokowi yang berdasarkan data LHKPN.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* yaitu kekayaan Jokowi yang mengalami kenaikan dalam setahun terakhir. Pada unsur *where* berada di Jakarta dan pada unsur *when* terjadi pada 09 September 2021. Kemudian, pada unsur *who* yaitu Presiden RI Joko Widodo. Unsur *why* mengenai kenaikan harta pejabat negara selama pandemi Covid-19 mencapai 73 persen. Dalam unsur *how* mengenai peningkatan harta sekitar Rp 8,9 Miliar yang dimiliki oleh Presiden Jokowi dengan total kekayaan mencapai Rp 63 Miliar.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini, unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu kekayaan harta orang nomor satu di tanah air yaitu Presiden RI Joko Widodo yang mencapai Rp 63 Miliar tetapi tidak memiliki kendaraan mewah berdasarkan data LHKPN. Kemudian pada unsur kata ganti yaitu “orang nomor satu di tanah air” yang dimaksud dengan Presiden RI Joko Widodo.

4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik memunculkan elemen grafis yang ditampilkan oleh penulis yaitu penebalan pada judul dan penggunaan huruf besar serta menggunakan foto Presiden Jokowi yang sedang turun dari dalam mobil kepresidenan

E. Analisis Artikel Berita 5 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Harta Kekayaan Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 09 September 2021

Ringkasan: Salah satu pejabat yang harta kekayaannya naik selama pandemi adalah Presiden Joko Widodo dalam setahun terakhir, harta kekayaan Jokowi naik sekitar Rp 8,9 Miliar dengan total harta kekayaan lebih dari Rp 63 Miliar. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54 Miliar walaupun aset tanah dan bangunan serta kendaraan yang masih sama jumlahnya hanya nilainya yang berubah karena apresiasi nilai aset.

Tabel 4.23 Analisis Artikel Berita 5 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | Harta Kekayaan Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir |
| | Lead | Harta kekayaan Jokowi naik selama setahun terakhir sekitar Rp 8,9 Miliar dengan total kekayaan lebih dari Rp 63 Miliar |
| | Latar Informasi | Dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54 Miliar. |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. "Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik maka di LHKPN saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya". |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup oleh penulis dengan memberikan informasi mengenai |

| | | |
|----------------|---|--|
| Skrip | What | <p>pernyataan dari Pahala Nainggolan mengenai Nilai Jual Objek Pajak yang naik, maka dalam LHKPN akan dilaporkan naik jumlah kekayaannya. Kenaikan harta kekayaan Jokowi mencapai Rp 8,9 Miliar.</p> |
| | Where | Jakarta |
| | When | 09 September 2021 |
| | Who | Pahala Nainggolan dan Presiden RI Joko Widodo |
| | Why | Kenaikan harta Presiden Jokowi terjadi karena adanya apresiasi pada nilai aset. Presiden Jokowi memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 63 Miliar dalam laporan periodik 2020 yang disampaikan pada 13 Maret 2021. |
| | How | Unsur detail yang digunakan Tempo dalam berita ini adalah menjelaskan sejumlah aset yang dimiliki oleh Presiden Jokowi masih sama. Namun, penambahan harta terjadi karena apresiasi nilai aset. Kemudian, terdapat unsur koherensi sebab akibat menggunakan kata hubung “sebab”. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | <p>Elemen leksikon yaitu terdapat penggunaan kata “kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa”. Elemen grafis menjelaskan penonjolan oleh Tempo tentang harta kekayaan Jokowi yang naik sekitar Rp 8,9 Miliar dengan judul yang menggunakan penebalan dan huruf besar pada pemberitaannya. Serta menggunakan foto Presiden Jokowi yang sedang memberikan pujian dan apresiasi atas pencapaian prestasi atlet badminton.</p> |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini, penulis menjelaskan harta kekayaan Presiden Jokowi dalam setahun terakhir naik sekitar Rp 8,9 Miliar. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan oleh penulis yaitu “Harta Kekayaan Jokowi Naik Sekitar Rp 8,9 Miliar dalam Setahun Terakhir”. Pada *lead* menjelaskan harta kekayaan Jokowi naik sekitar Rp 8,9 Miliar dengan total kekayaan lebih dari Rp 63 Miliar. Dalam Latar Informasi menjelaskan dibandingkan dengan tahun lalu total kekayaan Presiden Jokowi berjumlah Rp 54 Miliar. Pada kutipan sumber yaitu kutipan dari Pahala Nainggolan dengan menjelaskan terjadinya kenaikan harta pejabat negara di LHKPN karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang naik. Penutup dalam artikel ini merupakan informasi mengenai pernyataan Pahala Nainggolan mengenai Nilai Jual Objek Pajak yang naik, maka dalam LHKPN akan dilaporkan jumlah harta kekayaan pejabat negara tersebut.

2. Struktur Skrip

Dilihat dari struktur skrip pada pemberitaan ini, penulis sudah melengkapi dengan unsur 5W+1H. pada unsur *what* mengenai kenaikan harta kekayaan Jokowi yang mencapai Rp 8,9 Miliar. Pada unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 09 September 2021. Unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan dan Presiden RI Jokowi. Lalu, pada unsur *why* mengenai kenaikan harta Presiden Jokowi terjadi karena adanya apresiasi nilai aset. Pada unsur *how* mengenai Presiden Jokowi memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 63 Miliar dalam laporan periodik 2020 yang disampaikan pada 13 Maret 2021.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini, unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis yaitu dengan menjelaskan sejumlah aset yang dimiliki oleh Presiden RI Joko Widodo yang masih sama. Namun, penambahan hartanya terjadi karena apresiasi nilai aset. Kemudian, terdapat unsur koherensi sebab akibat dengan menggunakan kata “sebab”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon dengan penggunaan kata “kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa”. Lalu, elemen grafis

dalam pemberitaan ini penulis menggunakan penonjolan pada harta kekayaan Jokowi yang naik sekitar Rp 8,9 Miliar pada judul pemberitaan serta menggunakan penebalan dan huruf besar pada judul. Pada foto yang digunakan yaitu foto Presiden Jokowi yang sedang memberikan pujian dan apresiasi atas pencapaian atlet badminton.

F. Analisis Artikel Berita 6 Saat Pandemi Covid-19

Judul: Harta Pejabat Meningkat saat Pandemi, Pakar: Bahagia Di Atas Derita Rakyat

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 12 September 2021

Ringkasan: Sebanyak 70 persen pejabat negara harta kekayaannya meningkat selama periode 2020. Hal tersebut dinilai oleh Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta sebagai persoalan etika politik jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha yang cenderung untuk mengabaikan etikanya sebagai pejabat negara dan semestinya menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.24 Analisis Artikel Berita 6 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | Harta Pejabat Meningkat saat Pandemi, Pakar: Bahagia Di Atas Derita Rakyat |
| | <i>Lead</i> | Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai bahwa kenaikan harta sejumlah pejabat negara bisa dibaca sebagai persoalan etika politik. |
| | Latar Informasi | Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta menjelaskan bahwa kenaikan harta pejabat negara merupakan masalah etika politik jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. |
| | Kutipan Sumber | Ubedilah Badrun (Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta): |

1. “Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bahagia diatas derita rakyat banyak,”.

2. “Pejabat boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi kita boleh dong bertanya-tanya, bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini”.

3. “Ini lah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik”.

Pernyataan Opini

Ubed mempertanyakan apakah kenaikan harta para pejabat negara karena berbisnis vaksin, PCR test, tes antigen, alat kesehatan.

Penutup

Artikel ini ditutup dengan jajaran pejabat negara yang berada di bawah kabinet presiden Joko Widodo yang hartanya melonjak.

Skrip

What

Kenaikan harta pejabat negara diartikan sebagai persoalan etika politik

Where

Jakarta

When

12 September 2021

Who

Ubedilah Badrun, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PertahananPrabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

| | | |
|----------------|---|--|
| | Why | Kenaikan sejumlah harta pejabat negara |
| | How | Berdasarkan LHKPN periode 2020 sebagian besar harta pejabat negara bertambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Pada unsur detail dalam artikel ini menjelaskan mengenai etika politik terkait kenaikan harta pejabat jika para pejabat negara perlu memposisikan dirinya sebagai seorang pejabat negara bukan pengusaha dari pernyataan analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun. Terdapat koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “pada”, “berdasarkan”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Elemen leksikon yang digunakan pada Tempo yaitu sudah kena “delik” yang mengarah pada korupsi, arti delik sendiri dalam KBBI adalah sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Pada elemen grafis Tempo menggunakan penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relatif besar dan dalam berita ini Tempo menampilkan foto kumpulan uang Rp.100.000 |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis yang menunjukkan pada gambaran berita ini adalah judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Tempo.co memberikan judul “Harta Pejabat Meningkatkan saat Pandemi, Pakar: Bahagia Di Atas Derita Rakyat”. Dengan menggunakan pernyataan sindiran dari analisis sosial politik

pada judul yang digunakan. Pada *lead* dan latar informasi, Tempo.co ingin memberikan penekanan dari pernyataan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun bahwa kenaikan harta pejabat negara merupakan masalah etika politik jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Pada kutipan sumber penulis ingin menyampaikan bahwa pejabat boleh untuk bertambah kaya, akan tetapi publik juga diperbolehkan untuk bertanya mengenai kenaikan harta kekayaan tersebut. Dalam pernyataan opini terdapat pendapat dari Ubed mengenai kenaikan harta pejabat negara karena berbisnis vaksin, PCR test, test antigen, atau alat kesehatan lainnya. Dalam pemberitaan ini ditutup dengan jajaran pejabat negara yang berada di bawah kabinet presiden Joko Widodo yang hartanya melonjak.

2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip adalah 5W+1H, dalam pemberitaan ini unsur *what* adalah kenaikan harta pejabat negara yang diartikan sebagai persoalan etika politik. Unsur *where* yang berada di Jakarta. Pada unsur *who* terkait dengan pemberitaan ini yaitu Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. *When* pada 12 September 2021. Unsur *why* yaitu terdapat kenaikan sejumlah harta pejabat negara. Pada unsur *how* kenaikan harta pejabat negara berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2020 sebagian besar dari harta pejabat bertambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.

3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam pemberitaan ini terdapat unsur detail yang menjelaskan etika politik terkait dengan kenaikan harta pejabat negara yang perlu diketahui bahwa pejabat negara perlu memposisikan dirinya sebagai seorang pejabat negara bukan pengusaha dari pernyataan analis sosial politik Ubedilah Badrun. Kemudian, terdapat unsur koherensi penjelas dengan menggunakan kata hubung “pada”, “berdasarkan”.

4. Struktur Retoris

Struktur retorik dalam pemberitaan yang digunakan Tempo.co memunculkan elemen leksikon yaitu penggunaan kata sudah kena “delik” yang mengarah pada korupsi, arti delik sendiri dalam KBBI adalah sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian pada elemen grafis yang digunakan Tempo.co adalah penebalan tulisan dan ukuran huruf yang relatif besar dan dalam berita ini Tempo.co menampilkan foto ilustrasi kumpulan uang Rp. 100.000.

G. Analisis Artikel Berita 7 Saat Pandemi Covid-19

Judul: KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 Persen

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 18 Agustus 2021

Ringkasan: Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti turunnya angka kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya 55 persen di tahun 2021. Sedangkan, pada tahun 2020, tingkat kepatuhan melapor mencapai 100 persen.

Tabel 4.25 Analisis Artikel Berita 7 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|------------------------|--|
| Sintaksis | Judul | KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 Persen |
| | <i>Lead</i> | Turunnya angka kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan hartanya ke LHKPN 2021 |
| | Latar Informasi | Pelaporan anggota DPR menurun drastis menjadi 55 persen pada DPR dan DPRD tinggal 90 persen. |
| | Kutipan Sumber | Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK): 1. “Untuk yang legislatif ternyata menurun drastis. Dulu DPR-DPRD, dua-duanya 100 persen. Sekarang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen”. |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 2. “Tapi PR kami sekarang bagaimana 55 persen dan 90 persen ini bisa naik kembali ke 100 persen”. |
| | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Penutup dalam artikel ini merupakan pernyataan dari KPK mengenai total pelaporan penyelenggara negara pada tahun 2021. |
| Skrip | <i>What</i> | Kepatuhan LHKPN DPR menurun. |
| | <i>Where</i> | Jakarta |
| | <i>When</i> | 18 Agustus 2021 |
| | <i>Who</i> | Pahala Nainggolan |
| | <i>Why</i> | KPK berusaha untuk memaksimalkan 100 persen kepatuhan pejabat negara dalam melapor LHKPN. |
| | <i>How</i> | Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan penyelenggara negara yang ingin maju ke pemilihan legislatif dengan melaporkan LHKPN. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail yaitu KPK mencatat pelaporan penyelenggara negara pada tahun 2020 tingkat kepatuhan mencapai 100 persen, namun tahun 2021 untuk lembaga legislatif menurun drastis mencapai 55 persen pada DPR dan 90 persen pada DPRD. Unsur kata ganti yaitu “mereka” yang dimaksud pada anggota DPR atau DPRD. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Struktur retorik, elemen leksikon yang digunakan dalam berita terdapat kata “menyoroti” yang berarti menerangi dan “menurun drastis”. Pada elemen grafis Tempo.co menggunakan penebalan dan huruf besar pada <i>headline</i> pemberitaan serta menggunakan foto Ketua KPK baru yaitu Firlil Bahuri. |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis pemberitaan ini menunjukkan sebuah gambaran mengenai Judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan opini, dan penutup. Penulis memberikan judul “KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 Persen” dengan menjelaskan turunnya angka kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN yang disoroti oleh KPK. Pada *lead* dan latar informasi menjelaskan turunnya angka kepatuhan anggota DPR menjadi 55 persen dan DPRD 90 persen. Kutipan sumber yang digunakan oleh penulis yaitu kutipan dari Pahala Nainggolan mengenai anggota DPR dan DPRD yang tahun lalu melaporkan LHKPN mencapai presentase 100 persen. Sekarang untuk DPR menurun drastis tinggal 55 persen dan DPRD 90 persen. Penutup dalam artikel ini menjelaskan pernyataan dari KPK mengenai total pelaporan penyelenggara negara pada tahun 2021.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, unsur *what* mengenai kepatuhan LHKPN DPR yang menurun drastis. Pada *where* yang berada di Jakarta dan *when* terjadi pada 18 Agustus 2021. Lalu, unsur *who* yaitu Pahala Nainggolan. Unsur *why* menjelaskan KPK yang berusaha untuk memaksimalkan 100 persen kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN. Kemudian, pada unsur *how* Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan penyelenggara negara yang ingin maju ke pemilihan legislative harus melaporkan LHKPN.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini, unsur detail yang ditonjolkan oleh penulis mengenai KPK yang mencatat pelaporan dari penyelenggara negara pada tahun 2020 tingkat kepatuhannya mencapai 100 persen, namun pada tahun 2021 untuk lembaga legislatif menurun drastic mencapai 55 persen pada DPR dan DPRD 90 persen. Dalam unsur kata ganti yang digunakan penulis yaitu “mereka” yang dimaksud pada anggota DPR atau DPRD.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yang digunakan dalam berita terdapat kata “menyoroti” yang berarti menerangi dan

“menurun drastis”. Pada elemen grafis, penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada *headline* pemberitaan serta menggunakan foto Ketua KPK baru yaitu Firli Bahuri.

H. Analisis Artikel Berita 8 Saat Pandemi Covid-19

Judul: LHKPN Nurul Ghufron, Makin Tajir Setelah Jadi Pimpinan KPK

Sumber: Tempo.co

Tanggal: 01 Desember 2021

Ringkasan: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 13 Miliar per Desember 2020. Harta kekayaannya tersebut terhitung terus meningkat sejak Ghufron menyettor LHKPN pertama pada tahun 2015.

Tabel 4.26 Analisis Artikel Berita 8 Saat Pandemi Covid-19

| Perangkat Framing | Unit Pengamatan | Hasil Pengamatan |
|-------------------|-------------------------|---|
| Sintaksis | Judul | LHKPN Nurul Ghufron, Makin Tajir Setelah Jadi Pimpinan KPK |
| | Lead | Harta kekayaan Wakil Ketua KPK terus meningkat sejak ia menyettor LHKPN pada tahun 2015 |
| | Latar Informasi | Kekayaan Nurul Ghufron terus meningkat dari tahun 2015-2020 |
| | Kutipan Sumber | Tidak ada kutipan sumber |
| Skrip | Pernyataan Opini | - |
| | Penutup | Artikel ini ditutup dengan pelaporan dari Nurul Ghufron yang selalu menyettor LHKPN pada 31 Desember. |
| | What | Kenaikan harta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron |
| | Where | Jakarta |
| | When | 01 Desember 2021 |
| | Who | Nurul Ghufron |
| | Why | Harta kekayaan Nurul Ghufron terus meningkat |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <i>How</i> | Kekayaan Nurul Ghufron terus meningkat sejak 2015 sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada akhir 2019. |
| Tematik | Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat | Unsur detail pada Tempo.co yaitu menjelaskan harta kekayaan Nurul Ghufron sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga menjadi Wakil Ketua KPK. Unsur koherensi penjas yaitu dengan menggunakan kata hubung “pada”, “terekam”, “hingga”. |
| Retoris | Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik | Pada elemen leksikon yang ditampilkan oleh Tempo.co yaitu penggunaan kata “makin tajir” pada judul pemberitaan. Pada unsur grafis penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada judul serta foto Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda |

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dari pemberitaan ini, penulis menjelaskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 13,48 Miliar per Desember 2020. Angka kekayaannya tersebut terus meningkat sejak LHKPN pada 2015. Hal tersebut didukung dengan judul yang diberikan oleh penulis mengenai “LHKPN Nurul Ghufron, Makin Tajir Setelah Jadi Pimpinan KPK”. Pada *lead* dan latar informasi menjelaskan mengenai harta kekayaan Nurul Ghufron yang terus meningkat sejak ia menyetero LHKPN pada tahun 2015. Dalam artikel pemberitaan ini tidak adanya kutipan sumber dan pernyataan opini. Kemudian, penutup dalam artikel ini ditutup dengan pelaporan dari Nurul Ghufron yang selalu menyetero LHKPN pada 31 Desember.

2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip pemberitaan ini, penulis sudah mencakup unsur 5W+1H. unsur *what* mengenai kenaikan harta kekayaan Nurul Ghufron. Pada unsur *where* berada di Jakarta dan unsur *when* terjadi pada 01 Desember 2021. Unsur *who* yaitu Nurul Ghufron. Kemudian, unsur *why* mengenai harta kekayaan Nurul Ghufron yang terus meningkat dan pada unsur *how* mengenai kekayaan Nurul Ghufron yang terus meningkat sejak 2015 sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada akhir 2019.

3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik pemberitaan ini terdapat unsur detail mengenai harta kekayaan Nurul Ghufron sejak tahun 2015 terus mengalami penambahan harta kekayaan hingga tahun 2020. Unsur koherensi dalam pemberitaan ini yaitu dengan menggunakan kata hubung “pada”, “terekam”, “hingga”, “pada”.

4. Struktur Retoris

Dalam struktur retorik pemberitaan ini memunculkan elemen leksikon yang ditampilkan oleh penulis yaitu dengan penggunaan kata “makin tajir” pada judul pemberitaan. Pada elemen grafis penulis menggunakan penebalan dan huruf besar pada judul pemberitaan serta menggunakan foto Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda.

4.3 Komparasi Pembingkai Pemberitaan Isu Kekayaan Pejabat Sebelum dan di masa Pandemi pada Portal Berita Kompas.com dan Tempo.co

4.3.1 Komparasi Pembingkai Pemberitaan Isu Kekayaan Pejabat Sebelum Pandemi pada Kompas.com dan Tempo.co

Dari hasil penelitian menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki tersebut, maka dapat diambil garis besar pemberitaan secara umum seputar pemberitaan isu harta kekayaan pejabat sebelum pandemi Covid-19 pada portal berita Kompas.com dan Tempo.co disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.27 Komparasi Pembingkai Pemberitaan Isu Harta Kekayaan Pejabat Sebelum Pandemi antara Kompas.com dan Tempo.co

| Perangkat Framing | Kompas.com | Tempo.co |
|-------------------|--|--|
| Sintaksis | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan kata untuk judul berita mengandung unsur informatif mengenai isu harta kekayaan pejabat sebelum pandemi • Rata-rata judul berita berasal dari kutipan sumber • <i>Lead</i> yang disajikan memiliki alur sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa yang mencakup topik utama pemberitaan • Narasumber yang digunakan lebih dari satu • Penutup memuat informasi dengan menegaskan pernyataan dari kutipan sumber | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan kata untuk judul pemberitaan lugas dan terdapat kata sindiran • <i>Lead</i> yang disajikan secara ringkas terkait isi pemberitaan • Narasumber yang digunakan lebih dari satu • Penutup memuat informasi dengan menegaskan pernyataan dari kutipan sumber |
| Skrip | <ul style="list-style-type: none"> • Berita memuat unsur 5W+1H dengan lebih menonjolkan unsur <i>what</i> yaitu berisi mengenai presentase kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat negara | <ul style="list-style-type: none"> • Berita memuat unsur 5W+1H dengan menonjolkan unsur <i>why</i> |
| Tematik | <ul style="list-style-type: none"> • Berita disusun dengan thematic framing yang lebih interpretatif terhadap sebuah kejadian | <ul style="list-style-type: none"> • Berita disusun dengan thematic framing yang lebih interpretatif terhadap sebuah kejadian |
| Retoris | <ul style="list-style-type: none"> • Kompas menekankan pada unsur grafis dalam judul berita menggunakan huruf besar dan penebalan. Pada penggunaan foto menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Tempo menekankan pada unsur leksikon dan grafis. Dalam penggunaan foto menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan |

Dalam hasil rangkuman pada artikel **Kompas.com** secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat sebelum pandemi Covid-19. Dalam pembedingkaian yang dilakukan oleh Kompas.com pada isu kekayaan pejabat sebelum pandemi dengan berfokus kepada tingkat kepatuhan pejabat negara yang diberitakan secara objektif dalam data presentase yang cenderung rendah dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada struktur sintaksis berisi mengenai presentase tingkat pelaporan pejabat negara dalam menyetorkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hal tersebut diperkuat dengan judul pemberitaan yang diberikan. Dalam pernyataan yang diberikan oleh narasumber yang dijadikan sumber berita oleh Kompas.com menyatakan bahwa terdapat pejabat negara yang sudah dan belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Narasumber yang dimuat oleh Kompas.com lebih dari satu yaitu narasumber utama dari pihak KPK dan narasumber satunya sebagai penegasan dari narasumber awal yaitu terdapat tanggapan dari Komisioner KPU mengenai batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Kompas.com pun tidak mewawancarai dari pihak pejabat negara yang sudah melapor atau belum melaporkan harta kekayaannya. Pada *lead* yang dimuat oleh Kompas.com menggunakan jenis *lead* deskriptif dengan membuat pembaca dapat merasakan sebuah peristiwa yang dibingkai oleh Kompas.com melalui *lead* tersebut. Serta pada kutipan yang dimuat oleh Kompas.com sangat mendukung informasi yang ingin disampaikan yang dimuat juga ke dalam judul pemberitaan mengenai presentase pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Dalam penutup dari artikel yang diterbitkan Kompas.com berisi penegasan dari kutipan sumber mengenai informasi utama yang disampaikan.

Kemudian dalam struktur skrip mengenai cara penulis dalam mengisahkan sebuah fakta. Kompas.com menyajikan pemberitaan tersebut dengan unsur 5W+1H secara lengkap dari keseluruhan artikel dengan menonjolkan unsur *what* mengenai presentase tingkat kepatuhan melapor harta kekayaan pejabat negara. Lalu, pada struktur tematik keseluruhan artikel, peneliti menemukan fakta mengenai berita yang disajikan Kompas.com yang berusaha ditekankan yaitu terdapat perbaikan presentase pelaporan harta kekayaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam meningkatkan presentase pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, pada perbaikan pelaporan harta kekayaan pejabat tersebut masih terbilang rendah dan masih belum tercapainya angka kepatuhan yang maksimal 100% dalam melaporkan harta kekayaannya. Pada struktur retorik dari keseluruhan artikel yang diberitakan Kompas.com dalam pemilihan gambar berkaitan dengan informasi yang disajikan, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keterangan dari informasi pemberitaan.

Sedangkan dalam hasil rangkuman artikel pada **Tempo.co** secara keseluruhan artikel mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat sebelum pandemi Covid-19. Peneliti menemukan bahwa pembingkaiannya yang berusaha dibentuk oleh Tempo.co berfokus pada peringatan pada pejabat negara yang masih rendah dalam melaporkan harta kekayaannya atau tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam pemberitaan tersebut terdapat bentuk sindiran dari politikus dengan menggunakan kata seperti “Ehhh, katanya bersih! Ternyata seperti ini? Tak pernah lapor harta kekayaan?” dan juga Tempo.co mewawancarai pejabat negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya dengan terdapat pernyataan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa seluruh kabinet kerja telah menyerahkan LHKPN tahun 2019. Pada judul yang diterbitkan oleh Tempo.co lebih lugas serta terdapat kata peringatan dan sindiran mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat negara. Narasumber yang dimuat oleh Tempo.co terdapat lebih dari satu selain dari pihak KPK. Narasumber satunya sebagai penegasan dari narasumber awal yaitu terdapat tanggapan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufriana Wira Sakti dengan menanggapi pernyataan dari politikus terkait ketidakpatuhan pelaporan Menteri di pemerintahan Jokowi. Lalu Tempo juga mewawancarai Menteri Perindustrian yang sudah melaporkan harta kekayaannya terkait kendala dalam melaporkan LHKPN hanya soal masalah teknis dan tidak ada kendala yang berarti baginya dalam melaporkan LHKPN. Tempo.co juga memuat *lead* dengan secara ringkas sehingga pembaca dapat mengerti isi keseluruhan berita dengan membaca *lead* tersebut. Serta dalam kutipan sumber yang dimuat sangat mendukung informasi yang ingin

disampaikan. Dalam penutup artikel yang diterbitkan Tempo.co berisi mengenai penegasan dari kutipan sumber yang disampaikan.

Kemudian struktur skrip mengenai cara penulis dalam mengisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan mengenai Isu Harta Kekayaan Pejabat Sebelum Pandemi Covid-19. Tempo.co sudah menyajikan unsur 5W+1H secara lengkap di keseluruhan artikel dengan menonjolkan unsur *why* mengenai rendahnya pelaporan LHKPN periode 2019 penyelenggara negara. Sedangkan, dalam struktur tematik dari keseluruhan artikel peneliti menemukan fakta mengenai berita yang disajikan Tempo.co yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang malas dalam melaporkan LHKPN ke KPK dengan tingkat presentase 49,1 persen dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sudah mencapai 60 persen. Pada struktur retorik dari keseluruhan artikel yang diterbitkan Tempo.co dalam pemilihan gambar berkaitan dengan informasi yang disajikan, sehingga dapat menguatkan keterangan informasi yang disajikan oleh penulis.

4.3.2 Komparasi Pembingkai Pemberitaan Isu Kekayaan Pejabat di Masa Pandemi pada Kompas.com dan Tempo.co

Dari hasil penelitian menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki tersebut, maka dapat diambil garis besar pemberitaan secara umum seputar pemberitaan isu harta kekayaan pejabat di masa pandemi Covid-19 pada portal berita Kompas.com dan Tempo.co disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.28 Komparasi Pembingkai Pemberitaan Isu Harta Kekayaan Pejabat di Masa Pandemi antara Kompas.com dan Tempo.co

| Perangkat Framing | Kompas.com | Tempo.co |
|-------------------|---|---|
| Sintaksis | <ul style="list-style-type: none"> Pemilihan kata untuk judul berita mengandung unsur informatif mengenai isu harta kekayaan pejabat di masa pandemi Rata-rata judul berita berasal dari kutipan sumber | <ul style="list-style-type: none"> Pemilihan kata untuk judul pemberitaan lugas dan terdapat kata sindiran <i>Lead</i> yang disajikan dibuat secara ringkas terkait isi pemberitaan Narasumber yang digunakan hanya satu yang tersedia |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lead</i> yang disajikan merupakan jenis <i>lead</i> deskriptif yang memiliki alur cerita sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa yang mencakup topik utama pemberitaan • Narasumber yang digunakan lebih dari satu • Penutup memuat informasi dengan menegaskan pernyataan dari kutipan sumber | <ul style="list-style-type: none"> • Penutup memuat informasi yang menegaskan topik pemberitaan |
| Skrip | <ul style="list-style-type: none"> • Berita memuat unsur 5W+1H dengan lebih menonjolkan unsur <i>what</i> yaitu berisi mengenai pertambahan harta kekayaan pejabat dengan kata yang netral | <ul style="list-style-type: none"> • Berita secara lengkap dimuat dengan unsur 5W+1H dengan menonjolkan unsur <i>why</i> |
| Tematik | <ul style="list-style-type: none"> • Berita disusun dengan thematic framing yang lebih interpretatif terhadap sebuah kejadian | <ul style="list-style-type: none"> • Berita disusun dengan thematic framing yang lebih interpretatif terhadap sebuah kejadian |
| Retoris | <ul style="list-style-type: none"> • Kompas menekankan pada unsur grafis dalam judul berita menggunakan huruf besar dan penebalan. Pada penggunaan foto menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan | <ul style="list-style-type: none"> • Tempo menekankan pada unsur leksikon yaitu pemilihan kata yang menekankan sindiran terhadap pertambahan harta pejabat di masa pandemi. Dalam penggunaan foto tidak menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan |

Dalam hasil rangkuman pada artikel **Kompas.com** secara keseluruhan artikel terdapat beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat di masa pandemi Covid-19. Peneliti menemukan bahwa pemingkanaan yang berusaha ditekankan oleh Kompas.com dengan berfokus pada pertambahan harta kekayaan pejabat negara selama pandemi Covid-19 cenderung menggunakan kata yang netral dengan menyebutkan pertambahan harta pejabat di masa pandemi terdapat juga sejumlah pejabat yang mengalami penurunan harta karena latar belakang pejabat tersebut

yang sebagai pengusaha dan pertambahan harta pejabat tersebut masih terbilang wajar dalam berita yang diterbitkan. Kompas.com juga menekankan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi, tingkat pelaporan pejabat negara masih cenderung rendah dalam melaporkan harta kekayaannya. Pada struktur sintaksis berisi mengenai pertambahan harta kekayaan pejabat negara dan kepatuhan melapor LHKPN yang cenderung turun selama pandemi, hal tersebut diperkuat dengan judul pemberitaan yang diberikan. Dalam pernyataan yang diberikan oleh narasumber yang dijadikan sumber berita oleh Kompas.com yaitu dari pihak KPK menyatakan bahwa terdapat pejabat negara yang mengalami pertambahan harta selama pandemi, bahkan kalau yang pengusaha dapat mengalami penurunan harta. Narasumber yang dimuat oleh Kompas.com lebih dari satu, selain dari pihak KPK yang memiliki kredibilitas dalam pemberitaan mengenai isu harta kekayaan pejabat. Kompas.com bahkan memuat narasumber yang kurang kredibelitas dalam pemberitaan isu harta kekayaan pejabat yaitu pernyataan dari Dosen Universitas Indonesia Teguh Dartanto yang menyebutkan pandemi pengaruhi ketimpangan dan alasan pejabat negara bertambah kaya. Pada *lead* yang dimuat oleh Kompas.com menggunakan jenis *lead* deskriptif dengan memuat suatu berita menjadi mengalir, sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa tersebut sembari membacanya. Serta pada kutipan yang dimuat Kompas.com sangat mendukung informasi yang ingin disampaikan yang dimuat juga ke dalam judul pemberitaan mengenai pertambahan harta kekayaan pejabat negara selama pandemi. Penutup dari artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com berisi penegasan dari kutipan sumber mengenai informasi utama yang disampaikan.

Dalam struktur skrip mengenai cara penulis dalam mengisahkan sebuah fakta. Kompas.com menyajikan pemberitaan tersebut dengan unsur 5W+1H secara lengkap dari keseluruhan artikel dengan menonjolkan unsur *what* mengenai ungkapan kenaikan harta kekayaan pejabat negara selama pandemi Covid-19. Kemudian, pada struktur tematik secara keseluruhan artikel, peneliti menemukan fakta mengenai berita yang disajikan Kompas.com yang berusaha ditekankan yaitu selain pertambahan dan penurunan harta kekayaan pejabat negara di masa pandemi, bahkan terdapat pejabat negara yang cenderung melaporkan harta kekayaannya saat akan mengikuti pemilihan umum sebagai salah satu syarat pencalonan. Pada

struktur retorik dari keseluruhan artikel yang diberitakan oleh Kompas.com dalam pemilihan gambar berkaitan dengan informasi yang disajikan.

Sedangkan dalam hasil rangkuman artikel pada **Tempo.co** secara keseluruhan artikel mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat di masa pandemi Covid-19. Peneliti menemukan bahwa pembingkai yang berusaha dibentuk oleh Tempo.co masih dalam bentuk sindiran terhadap pejabat negara yang mengalami penambahan harta kekayaan di saat pandemi Covid-19 dan penurunan dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bahkan terdapat sindiran dari pakar mengenai harta pejabat yang meningkat di saat pandemi Covid-19 dengan pemilihan kata “mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk” dan juga terdapat kata “paling tajir” yang dimasukkan Tempo.co dalam judul pemberitaannya. Pada judul yang diterbitkan oleh Tempo.co lebih lugas. Narasumber yang dimuat oleh Tempo.co di masa pandemi Covid-19 cenderung hanya satu saja dengan narasumber utama dari pihak KPK dan tidak mewawancarai pejabat negara yang mengalami kenaikan harta kekayaan seperti periode sebelum pandemi. Tempo.co juga memuat *lead* dengan secara ringkas, sehingga pembaca dapat mengerti isi keseluruhan berita dengan membaca *lead* tersebut. kemudian dalam kutipan sumber yang dimuat sangat mendukung informasi yang ingin disampaikan. Penutup dari artikel yang diterbitkan Tempo.co berisi mengenai penegasan dari informasi utama yang disampaikan.

Kemudian struktur skrip mengenai cara penulis dalam mengisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan mengenai Isu Harta Kekayaan Pejabat di masa Pandemi Covid-19. Tempo.co sudah menyajikan unsur 5W+1H secara lengkap di keseluruhan artikel dengan menonjolkan unsur *why* mengenai kenaikan harta pejabat negara selama pandemi mencapai 70,3 persen. Sedangkan, dalam struktur tematik dari keseluruhan artikel peneliti menemukan fakta mengenai berita yang disajikan oleh Tempo.co yaitu sindiran dari pakar dan judul pemberitaan yang menyebutkan Menteri yang paling tajir terhadap penambahan harta kekayaan pejabat negara di masa pandemi Covid-19 dan masih terdapat penurunan dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat negara. Dalam menanggapi kepatuhan DPR dalam menyampaikan LHKPN

yang turun, Tempo.co juga menerbitkan artikel dengan kalimat pertanyaan berupa sindiran pada judul pemberitaan dengan menyebutkan “harta kekayaan apa saja wajib lapor?”. Pada struktur retorik dari keseluruhan artikel yang diterbitkan Tempo.co dalam pemilihan gambar tidak terlalu menguatkan keterangan dari informasi berita tersebut, karena banyak foto yang tidak sesuai dengan judul pemberitaan. Kemudian dalam pemilihan kata yang disajikan Tempo.co menekankan mengenai sindiran terhadap pertambahan harta kekayaan pejabat negara di masa pandemi Covid-19.

Dilihat dari hasil rangkuman pada artikel Kompas.com sebelum pandemi dan di masa pandemi, pada struktur sintaksis untuk pemilihan kata dalam judul sama-sama mengandung unsur informatif dalam pemberitaannya mengenai isu harta kekayaan pejabat. Rata-rata judul berita juga berasal dari kutipan sumber dan *lead* menggunakan jenis *lead* deskriptif yang mencakup topik utama pemberitaan. Narasumber yang digunakan hanya satu yang tersedia sebelum pandemi dan lebih dari satu narasumber di masa pandemi, serta penutup memuat informasi yang menegaskan pernyataan dari kutipan sumber.

Kemudian dalam struktur skrip, Kompas sebelum pandemi memuat unsur 5W+1H dengan menonjolkan unsur *what* mengenai presentase kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat negara yang cenderung rendah dalam melaporkan harta kekayaannya. Namun, pada periode di masa pandemi Kompas.com dalam unsur *what* membahas mengenai pertambahan harta kekayaan pejabat dengan kata yang netral. Dalam struktur tematik Kompas.com sebelum dan di masa pandemi sama-sama dilihat melalui sebuah kejadian dengan menyajikan informasi yang melalui pengolahan data terlebih dahulu. Pada struktur retorik, Kompas.com sebelum dan di masa pandemi juga sama-sama menekankan pada unsur grafis dengan penebalan dan penggunaan huruf besar pada judul pemberitaan serta penggunaan foto yang menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan.

Dilihat dari hasil rangkuman pada artikel Tempo.co sebelum pandemi dan di masa pandemi, pada struktur sintaksis untuk pemilihan kata judul yang disajikan dalam pemberitaan sama-sama lugas. Dengan memberitakan penurunan pelaporan harta kekayaan serta pertambahan harta kekayaan di masa pandemi yang masih berfokus pada kritik terhadap pejabat negara dalam bentuk sindiran. Kemudian,

dalam *lead* yang disajikan dibuat secara ringkas terkait isi pemberitaan. Narasumber yang digunakan Tempo.co lebih dari satu sebelum pandemi dan di masa pandemi hanya menggunakan satu narasumber. Penutup artikel Tempo.co sebelum pandemi memuat informasi dengan menegaskan pernyataan dari kutipan sumber. Namun, penutup di masa pandemi memuat informasi yang menegaskan topik utama. Dalam struktur skrip Tempo.co sebelum dan di masa pandemi terlihat sama-sama menonjolkan unsur *why*.

Kemudian, pada struktur tematik Tempo.co sebelum dan di masa pandemi dilihat dari sebuah kejadian dengan menyajikan informasi yang melalui pengolahan data terlebih dahulu. Dalam struktur retorik dari artikel Tempo.co sebelum pandemi lebih menekankan pada unsur leksikon dan grafis mengenai penggunaan penebalan dan huruf besar pada judul pemberitaan serta foto yang digunakan menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan. Namun, pada Tempo.co di masa pandemi lebih menekankan pada unsur leksikon yaitu pemilihan kata yang menekankan sindiran terhadap pertambahan harta pejabat. Pada penggunaan foto pun tidak menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan.

Jika dibandingkan dengan kecenderungan kedua media dalam membingkai pemberitaan mengenai pemberitaan isu harta kekayaan pejabat sebelum dan di masa pandemi Covid-19 yang dipengaruhi oleh ideologi media dari masing-masing media. Mengingat kondisi ekonomi yang krisis karena pandemi Covid-19, pemberitaan Kompas sebelum dan di masa pandemi cenderung netral yang mendukung kebijakan dari pemerintahan dan memiliki kesamaan dalam membingkai peristiwa tersebut dengan menjelaskan secara rinci tentang presentase pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang masih cenderung rendah dalam pelaporannya dengan menggunakan kata yang netral serta menggunakan sumber yang sama yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, pada pemberitaan di Tempo.co mengenai isu harta kekayaan pejabat secara konsisten menempatkan dirinya sebagai pihak yang oposisi terhadap pemerintah. Pada periode sebelum pandemi terdapat sindiran dari politikus demokrat mengenai kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya dan pemberitaan. Namun, dalam pemberitaan di masa pandemi Tempo.co lebih keras dalam membingkai isu harta kekayaan pejabat dengan

menyebutkan Menteri yang paling “tajir” pada judul pemberitaan dan terdapat sindiran dari Pakar mengenai pertambahan harta pejabat di masa pandemi yang bahagia di atas penderitaan rakyat serta masih cenderung mengalami penurunan pelaporan dalam melaporkan harta kekayaannya.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu dengan pemilihan media surat kabar JawaPos dan Kompas mengenai pembingkai berita penyitaan harta Irjen Djoko Susilo oleh KPK. Hasil penelitian menjelaskan bahwa surat kabar JawaPos secara kritik dengan lebih menonjolkan aset-aset yang dimiliki oleh Djoko Susilo yang disita KPK dan memberitakan mengenai sikap negatif dari Irjen Djoko Susilo hal tersebut termasuk ke dalam *thematic framing* dengan memberitakan isu tersebut secara mendalam. Sedangkan, pada Kompas termasuk ke dalam *episodic framing* dengan tidak menceritakan isu tersebut secara mendalam dan lebih menceritakan adanya sanksi-sanksi yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Isu Harta Kekayaan Pejabat sebelum dan di masa pandemi Covid-19 pada portal berita Kompas.com dan Tempo.co. Pada Kompas.com sama-sama menceritakan peristiwa tersebut secara mendalam mengenai presentase pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pada Tempo.co walaupun secara kritik dalam membingkai isu tersebut Tempo.co pun juga menceritakan peristiwa tersebut secara mendalam seperti yang didapati pada penelitian terdahulu.

Dari kedua media yang telah dianalisis, terdapat perbedaan *framing* terhadap kedua media tersebut. Dalam pembingkai yang dilakukan Kompas.com dan Tempo.co terhadap Isu Harta Kekayaan Pejabat, sesuai dengan Teori Agenda Setting yang dikemukakan oleh Water Lippmann yang menjelaskan bahwa media bertindak sebagai perantara antara dunia luar dan sebuah gambaran dikepala kita dengan membentuk sebuah persepsi publik terhadap peristiwa yang terjadi (Morissan, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa, 2013). Pada Kompas.com sebelum pandemi memberitakan peristiwa isu harta kekayaan pejabat dengan terdapat perbaikan dalam melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi angka pelaporan tersebut masih cenderung rendah dan Kompas.com di masa pandemi memberitakan peristiwa tersebut dengan menggunakan kata-kata netral yang menyebutkan bahwa selain terdapat kenaikan

harta kekayaan pejabat negara, namun terdapat juga pejabat negara yang mengalami penurunan harta kekayaan. Hal tersebut didukung oleh judul yang diterbitkan oleh Kompas.com terkait dengan pemberitaan isu harta kekayaan pejabat dan sama-sama menggunakan *lead* deskriptif.

Kemudian jika dilihat dari ideologi media dalam keseluruhan artikel pemberitaan mengenai isu harta kekayaan pejabat negara yang diberitakan oleh media *online* Kompas.com dan Tempo.co. Kompas.com sendiri memiliki ideologi yang dengan mendukung kebijakan dari pemerintah dengan menampilkan penggunaan kalimat yang netral serta narasumber utama yang dari pihak KPK. Sementara pada Tempo.co sebaliknya memiliki ideologi yang oposisi atau mengkritisi kebijakan dari pemerintah yang menampilkan penggunaan kata mengkritisi yang terlihat pada judul pemberitaan dan menampilkan sejumlah narasumber dari pengamat dan politikus.

- Sedangkan pada *framing* yang dilakukan oleh Tempo.co sebelum pandemi terkait sindiran dari kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang cenderung rendah dan Tempo di masa pandemi menekankan terkait sindiran terhadap pejabat negara yang mengalami penambahan harta kekayaannya di saat pandemi Covid-19 dari pakar dan terdapat penurunan dalam melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN yang masih cenderung rendah juga dengan sama-sama menggunakan *lead* ringkasan pada pemberitaan yang diterbitkan.

Dalam perbedaan diantara *framing* dari kedua media tersebut dilihat dari struktur sintaksis terkait dengan judul yang diberikan di periode sebelum pandemi. Kompas.com mengambil narasumber dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan bahwa presentase pelaporan harta pejabat negara terdapat perbaikan setelah pihak KPK membantu proses pelaporan harta tersebut. Sedangkan, Tempo.co memuat terkait penilaian dari politikus terhadap pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN. Kemudian pada struktur sintaksis terkait dengan judul yang diterbitkan di periode masa pandemi Kompas.com mengambil narasumber yang sama seperti periode sebelum pandemi yaitu KPK yang mengatakan bahwa terdapat pejabat negara yang mengalami kenaikan dan penurunan harta kekayaan di masa pandemi. Pada struktur skrip

Kompas.com lebih menonjolkan unsur *what*. Sedangkan, pada Tempo.co memuat terkait dengan penilaian dari pakar terhadap penambahan harta pejabat negara di masa pandemi ditengah masyarakat yang sedang menderita dengan menonjolkan unsur *why* dalam pemberitaannya.

Jika diamati dari struktur tematik yang disajikan oleh kedua media Kompas.com dan Tempo.co baik periode sebelum dan di masa pandemi dapat dikategorikan ke dalam *thematic framing* karena menyajikan pemberitaan mengenai isu harta kekayaan pejabat secara mendalam dengan melalui konstruksi pada pemberitaan yang disebarluaskan ke dalam konteks yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan pemberitaan isu harta kekayaan pejabat selalu diberitakan secara berkelanjutan setiap tahunnya oleh media dan erat kaitannya dengan tugas media sebagai pengawas yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melaporkan informasi seputar kinerja dari pemerintah.

- Kemudian, perbedaan yang paling mencolok lainnya pada struktur retorik, dalam artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com baik periode sebelum dan di masa pandemi menampilkan foto yang sesuai dengan topik pemberitaan yang disajikan. Sedangkan, pada Tempo.co sebelum pandemi penggunaan foto menegaskan kesamaan dengan informasi yang disampaikan. Namun, dalam periode di masa pandemi penggunaan foto Tempo.co tidak menegaskan kesamaan dengan informasi pemberitaan yang disajikan.

Jika diamati dengan konstruksi realitas, masing-masing dari kedua media tersebut berusaha untuk memberikan informasi yang telah dilakukan pbingkaiian agar terbentuknya sebuah pemaknaan yang ditonjolkan berbeda pada khalayak yang membaca pemberitaan tersebut. dalam hal ini, kedua media tersebut memiliki ideologi masing-masing yang ada pada suatu pemberitaan yang diterbitkan oleh media tersebut. Kompas.com berusaha untuk menekankan isu harta kekayaan pejabat dengan presentse sebelum pandemi dan di masa pandemi mengenai pemberitaan penambahan harta dengan kata yang netral. Sedangkan pada Tempo.co sebelum dan di masa pandemi memperlihatkan sindiran dari politikus dan pakar terkait dengan pelaporan harta kekayaan dan penambahan harta kekayaan pejabat negara.

Jika diamati dengan fungsi media sebagai *watchdog*, kedua media sudah menjalankan peran media sebagai *platform* yang dapat membantu komunikasi manusia dengan memiliki peran penting. Khususnya melakukan sebuah pengawasan terhadap lembaga pemerintahan mengenai Isu Kekayaan Harta Pejabat sebelum pandemi periode Februari – April 2019 dan di masa pandemi periode September - Desember 2021. Media diharapkan dapat menjadi sebuah bagian dari pengawasan terhadap proses demokrasi di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui sistem politik yang sedang terjadi.

